

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA AMIL ZAKAT

(Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**MOHAMAD ALFI
NIM. 120 211 0401**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSHIYYAH) TAHUN 2017 M / 1439 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Terhadap
Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)

NAMA : MOHAMMAD ALFI

NIM : 120 211 0401

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSIYAH)

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, November 2017

Menyetujui:

Pembimbing I



Drs. Surya Sukti, MA
NIP. 196505161994021002

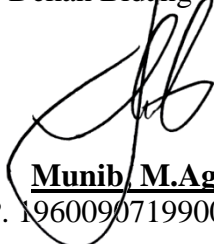
Pembimbing II



Norwili, M.H.I
NIP. 197002081998032001

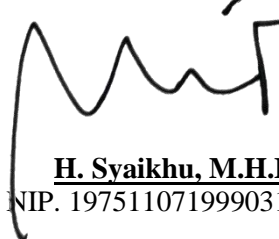
Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Munib, M.Ag.
NIP. 196009071990031002

Dekan Fakultas Syari'ah,



H. Syaikh, M.H.I
NIP. 197511071999031005

NOTA DINAS

Palangka Raya, November 2017

Perihal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara Mohamad Alfi

Kepada Yth.
Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di –
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Mohamad Alfi
NIM : 120 211 0401
Judul : **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI**
LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Terhadap Rumah
Peduli Nurul Fikri)

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I,



Drs. Surya Sukti, MA.
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II,



Norwili, M.H.I.
NIP. 197001081998032001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya), oleh MOHAMAD ALFI, NIM. 120 211 0401 telah dimunaqasyahkan TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 November 2017 M
26 Shafar 1439 H

Palangka Raya, 15 November 2017

Tim Penguji:

1. **Tri Hidavati, SHI, M.H.**

Ketua Sidang/Penguji

(.....)

2. **Dr. Syarifuddin, M.Ag**

Penguji I

(.....)

3. **Drs. Surya Sukti, MA.**

Penguji II

(.....)

4. **Norwili, M.H.I**

Sekretaris/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah

(.....)
H. Syaikh, M.H.I
NIP. 19711107 199903 1005

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)

ABSTRAK

Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri kota Palangka Raya salah satu realisasi dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang berbasis lembaga yang didirikan oleh masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan memfasilitasi para *muzakki* dalam menyalurkan zakat. Rumah Peduli Nurul Fikri merupakan bentuk nyata sebuah organisasi dengan konsep modern yang hadir di kota Palangka Raya dengan mengedepankan asas akuntabilitas dan transparansi dalam mengumpulkan, menghimpun, dan mendistribusikan zakat, sebagaimana di pasal 17 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk mewujudkan tujuan utama zakat sebagai upaya kesejahteraan umat Islam.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya? 2) Bagaimana Transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Penelitian hukum sosiologis empiris sedangkan data yang diperoleh dalam hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini ada 7 orang yang terdiri 2 orang yaitu pimpinan dan Manager divisi Marketing, 3 orang muzakki dan 2 orang relawan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri. Adapun informannya adalah 3 lembaga pengawas yaitu BAZNAS, KEMENAG, dan DINAS SOSIAL. Teknik dalam pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan hasil penelitian.

Hasil penelitian ini yaitu Akuntabilitas lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri ditandai dengan berbadan hukum dan juga memenuhi prinsip akuntabilitas pengelolaan zakat, yaitu berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabel. Hal ini merupakan pemenuhan kepatuhan hukum sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Transparansi lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya terlihat dalam mengelola dana zakat melalui keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan kepada instansi berwenang yang ikut serta dalam pengelolaan zakat. Transparansi pada lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri yaitu bersifat terbuka dalam pengelolaan zakat melalui proses pelaksanaan kegiatan dan informasi yang bisa diakses publik.

Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Zakat, Rumah Peduli Nurul Fikri kota Palangka Raya

ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF AMIL ZAKAT INSTITUTION

(Study on Rumah Peduli Nurul Fikri in Palangka Raya)

ABSTRACT

Amil Zakat Institution, Rumah Peduli Nurul Fikri Palangka Raya, one of the realizations of the Zakat Management Law based institution, established by the community as an effort to alleviate poverty and facilitate the muzakki in distributing zakat. Rumah Peduli Nurul Fikri is a concrete form of an organization with a modern concept presented in the city of Palangkaraya by emphasizing the principle of accountability and transparency in collecting, accumulating, and distributing zakat, as in Article 17 of Law No. 23 of 2011 on the Management of Zakat to realize the main purpose of zakat as an effort to prosperity of Muslims.

The problems of study in this research are: 1) How is accountability in the management of amil zakat institutions Rumah Peduli Nurul Fikri in Palangka Raya? 2) How is Transparency in the management of amil zakat institutions Rumah Peduli Nurul Fikri in Palangka Raya?

This research used descriptive qualitative approach with empirical sociological law research during the data obtained in the observation, interview, and documentation. The subjects of this study are 7 people consist of 2 people, namely the leader and Manager of Marketing division, 3 people muzakki and 2 volunteers amil zakat institution Rumah Peduli Nurul Fikri. The informants are 3 supervisory institutions namely BAZNAS, KEMENAG, and DINAS SOSIAL. The Techniques used in data validation is triangulation technique. Data analysis was conducted with 3 (three) stages: data reduction, data presentation and conclusion of research result.

The result of this research is Accountability of Amil zakat institution Rumah Peduli Nurul Fikri is characterized by legal entity and also fulfill the principle of accountability of zakat management, that is based on syariat Islam, trust, benefit, justice, legal certainty, integrity, and accountable. This is the fulfillment of legal compliance as Article 2 of Law Number 23 Year 2011 on Zakat Management.

Transparency of amil zakat institution Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya is seen in managing zakat funds through information disclosure and financial reporting to authorized institutions participating in the management of zakat management. Transparency in amil zakat institution Rumah Peduli Nurul Fikri is open in zakat management through process of implementation of activity and information which can be accessed by public.

Key words: Accountability, Transparency, Zakat, Rumah Peduli Nurul Fikri Palangka Raya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)”**. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang penelitian sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Penghormatan dan penghargaan kepada Ayahanda Bayekdan Ibunda Atha yang telah memberi semangat serta doa bagi penulis.
2. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH, MH, selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
3. Bapak H. Syaikh, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Surya Sukti, MA, selaku Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
5. Bapak Ali Murtadho. , S.Ag., M.H, selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
6. Bapak Ahmad Dasuki, Lc, selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan pembelajaran yang berharga serta bimbingan kepada penulis yang Insya Allah akan penulis amalkan.
7. Bapak Drs. Surya Sukti, MA, selaku Pembimbing I dan Ibu Norwili, M.H.I selaku pembimbing II, semoga Allah membalas segala kemuliaan hati para beliau yang begitu sabar dalam membimbing penulis hingga terselesaikannyaskripsi ini.
8. Dosen-dosen IAIN, khususnya Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang tidak bisa penulis sebut satu per satu yang telah meluangkan waktu dalam berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat AHS angkatan 2012 yang selalu menemani dalam suka dan duka, serta teman-teman mahasiswa HESY, dan lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwaskripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis.

Palangka Raya, November 2017

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfi' with a stylized flourish.

MOHAMAD ALFI

NIM. 120 211 0401

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



MOTO

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ

اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung. (QS Ar-Rum : 38)

PERSEMBAHAN

YANG UTAMA DARI SEGALANYA

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayangMu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat kucintai dan kusayangi

- ❖ Ayahanda yang ku sayangi **Bayek** dan ibunda tercinta **Silene**, selaku orang tua yang tiada pernah henti-hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga ananda selalu kuat menjalani rintangan yang ada di depan mata. Ayah, ibu terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. Dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya, demi bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah agar ananda bisa mencicipi bangku sekolah hingga perkuliahan. Maafkan ananda yang sampai sekarang masih menyusahkanmu.
- ❖ Adikku **Jumiati**, dan keluarga besar **Fadli Duban** dan **Amrin Usman** yang selalu memberikan doa, motivasi, dan semangat untuk menyelesaikan studiku ini. Tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian
- ❖ Teman Seperjuangan dan para sahabatku **Rusman, Hery, Yasmin, Estifan, Rifani, Arief, Nayla, Fadli, Sidik, Fajar, Jefri, Evan** dan **Zainor** yang selalu dan senantiasa ada untukku dikala senang maupun susah, terima kasih untuk semangat, dukungan, bantuan, candaawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama. Semoga pertemanan kita hingga kejannahNya
- ❖ Teman-teman satu kelas Ahwal Syakhshiyah 2012 para calon penegak keadilan, **Siti, Rini, Roudhotul, Ratih, Wahyu, Ulfah, Hasan, Halim, Risqi Hidayat, Kurniawan, Fifah, Arif, Estifan, Rifani, Ariandi**, dan **Aspiani**, yang selalu membantu, berbagi keceriaan, dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terima kasih banyak teman-teman. TIADA HARI YANG INDAH TANPA KALIAN SEMUA.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidain</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātulfitri</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya’ mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعى	Ditulis	<i>yas’ā</i>
Kasrah + ya’ mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawumati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawumati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Deskripsi Teoritik.....	15
1. Konsep Akuntabilitas	15
2. Konsep Transparansi	19
3. Konsep Lembaga Amil Zakat.....	23
4. Konsep Zakat.....	32
a. Pengertian Zakat	32
b. Syarat-Syarat Zakat	33
c. Tujuan dan Manfaat Zakat	35
d. Dasar Hukum Zakat	36
C. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
1. Waktu Penelitian	45
2. Lokasi Penelitian	46
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46

1. Jenis Penelitian	46
2. Pendekatan Penelitian	47
C. Sumber Data.....	47
D. Objek dan Subjek Penelitian	48
1. Objek Penelitian	48
2. Subjek Penelitian	49
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Pengabsahan Data	54
G. Analisis Data	56
BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitaan	58
B. Gambaran Subjek Penelitian	65
C. Pemaparan data	66
D. Analisis.....	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BAZ	: Badan Amil Zakat
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
SWT	: Subhanahu wa Ta'ala
S1	: Strata Satu
TTL	: Tempat Tanggal Lahir
QS	: Quran Surah
UU	: Undang-Undang
h	: Halaman
ed	: Editor
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi
SDM	: Sumber Daya Manusia
HR	: Hadis Riwayat
Yth	: Yang terhormat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan salah satu tonggak sejarah pengelolaan zakat Indonesia yang modern dengan melalui kelembagaan. Dengan adanya lembaga amil yang menghimpun zakat diharapkan akan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan di kalangan masyarakat, serta diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam sejarah dakwah perubahan sosial masyarakat yang menjadi tema sentral yang dilancarkan oleh individu-individu yang menghasilkan tingkat sosial masyarakat yang ideal. Akan tetapi, proses merekayasa masyarakat tidak semudah membalik telapak tangan, namun ia harus menunggu proses yang panjang.

Saat ini perubahan masyarakat yang sangat dinanti-nantikan adalah upaya meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Islam atau yang disebut dengan upaya memberdayakan ekonomi umat. Karena itu, bagi umat Islam diperlukan strategi yang didasarkan pada kebutuhan ekonomi masyarakat Islam, salah satunya dengan menyadarkan masyarakat muslim tentang potensi dan kekuatan ekonominya. Islam sangat menghargai dan melindungi hak milik seseorang akan tetapi pada saat yang sama, harta benda yang di miliki tersebut merupakan hak umat manusia untuk dinikmati dan digunakan.¹

¹Nahed Nurwairah, *Peremberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf*, Sekolah Tinggi Agama Islam Palangka Raya: Jurnal Kajian Islam, volume 1 nomor 1, 2009, h. 52.

Harta benda merupakan amanat yang harus dipelihara dan dikelola oleh pemiliknya untuk kemaslahatan manusia sesuai dalam batas-batas yang ditentukan oleh pencipta-Nya. Dengan kata lain dalam hak milik terdapat fungsi sosial dengan suatu kewajiban untuk memanfaatkan harta benda tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat dasar bagi perumusan-perumusan yuridis dalam menciptakan sistem kesejahteraan sosial.²

Islam memiliki perspektif tersendiri berkaitan dengan pertanggungjawaban karena dalam Islam semua yang dititipkan kepada manusia adalah amanah, konsep amanah merupakan bagian universal yang kemudian dituntunkan menjadi pertanggungjawaban (akuntabilitas), sebuah konsep barat yang diturunkan dari teori Agensi³. Pengelolaan zakat yang terakuntabilitasi atau amanah sebenarnya bukan konsep baru dalam Islam namun perlu dilembagakan yang meliputi pertanggungjawaban kepada yang memberi amanah, Penerima amanah dan amanah itu sendiri. Pemberi amanah dalam hal ini adalah Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai wakilnya di bumi (*khalifatullah fill ardh*) seperti dalam Alquran Surah Fathir ayat 39:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ
كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

Artinya:

²*Ibid.*, h. 53.

³ Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan.

Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.⁴

“Dialah yang menjadikanmu khalifah-kahlifah di bumi”. mempunyai makna si penerima amanah (khalifah) harus melakukan tugasnya di bumi secara bertanggungjawab, dan dalam menjalankan amanah tersebut harus bersifat adil dan menjadikannya sebagai rahmat (bermanfaat bagi orang lain).

Salah satu permasalahan yang kini tengah dihadapi masyarakat Indonesia termasuk kota Palangka Raya adalah kemiskinan. Menyikapi kondisi demikian, ajaran Islam yang dibangun atas lima dasar pilar yang termuat dalam rukun Islam salah satunya memuat tentang zakat. Zakat adalah ibadah *fardiyah* yang mengukuhkan hubungan vertikal antara *Muzakki* (pembayar zakat) dengan Tuhannya yang merefleksikan nilai spiritualitas yang mampu menumbuhkan nilai *charity* (kedermawanan) terhadap sesama manusia bahkan memiliki implikasi luas dalam aspek kehidupan sosial (*jama'iyah*), ekonomi (*iqtishadiyah*), budaya (*tsaqafah*), pendidikan (*tarbiyah*) dan aspek-aspek lainnya.⁵

Alquran membicarakan zakat dan mengaitkannya dengan sholat hampir 82 ayat yang diantaranya dalam QS. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

⁴ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahannya*, Depok: Cahaya Qur'an, 2008, h.

⁵ Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani (kelompok penerbit Intrans), 2011, h. 1.

Artinya

dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'⁶

Zakat jika ditinjau dari sistem ekonomi Islam merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosial-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan sebagai salah satu instrumen dalam pengentaskan kemiskinan. Di Indonesia kegiatan perzakatan mulai berkembang pada tahun 1990-an dengan munculnya lembaga amil zakat yang pengelolaannya *full time* dan dilaksanakan secara profesional. Hal tersebut merupakan tonggak sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Karena pada saat itu pula mulai muncul unsur-unsur profesional dan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan observasi peneliti, Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri merupakan salah satu realisasi dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang berbasis lembaga yang didirikan oleh masyarakat kota Palangka Raya sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan memfasilitasi para *Muzakki* dalam menyalurkan hartanya untuk berzakat.⁷

Rumah Peduli Nurul Fikri merupakan bentuk nyata sebuah amil dengan konsep modern yang hadir di kota Palangka Raya dengan mengedepankan asas akuntabilitas dan transparansi dalam mengumpulkan, menghimpun, dan mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq*, sebagaimana di pasal 17 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk mewujudkan tujuan utama zakat yaitu kesejahteraan umat Islam.

⁶ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahannya*,..... h. 7.

⁷ Administrator, 2015, <http://www.rpnf.org/profil-rpnf/> Diakses pada tanggal 27 April 2015 Pukul 18.53 WIB

Inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji Rumah Peduli Nurul Fikri dalam menggalang, menghimpun dan mendistribusikan zakat sehingga antara *mustahiq* dan *Muzakki* itu terjadi sikap *check and balance* yang tidak lain akan menghasilkan dana dari *Muzakki* maksimal dan distribusi yang merata kepada *mustahiq*. Pembahasan ini penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul: **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)”**.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari gambaran umum latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dan diteliti dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana Transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya.
2. Untuk mendeskripsikan wujud transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat di Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya.
2. Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti tentang pengelolaan zakat di Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya.
3. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan dasar oleh pihak lain yang mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Sistematika Penulisan

Proposal ini hanya menyajikan hal-hal yang pokok dan umum, sedangkan ulasan, perincian, tafsiran, pengertian serta pemikiran selanjutnya disesuaikan kemampuan yang ada pada peneliti. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan tentang antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian sebelumnya, deskripsi teoritik mengenai (konsep akuntabilitas, konsep transparansi, konsep lembaga amil zakat, dan konsep zakat) dan kerangka pikir.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan lokasi penelitian, jenis pendekatan penelitian, sumber data, objek dan penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

Bab IV: Penyajian dan Pembahasan Data

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, memuat analisis dan pembahasan serta akan diuraikan secara rinci mengenai penelitian dan hasil-hasilnya yang relevan dengan pembahasan.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, berkaitan dengan permasalahan zakat, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan zakat, namun terdapat substansi yang berbeda dengan persoalan yang peneliti angkat, penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Imbron Hamzah pada tahun 2006 dengan judul penelitian “Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara)”.⁸ Penelitian yang dilakukan Imbron Hamzah berfokus pada cara pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Jelai dan persepsi Masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Jelai.

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat kecamatan jelai?
- b. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat kecamatan jelai?

Dari rumusan diatas bahwa kesimpulan penilitian yang dilakukan oleh

Imron Hamzah menunjukan bahwa badan amil zakat telah memiliki

⁸Imron Hamzah, “Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kecamatan Jelai Kabupaten sukamara)”, *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2006, t.d.

perencanaan program kerja dengan mengambil zakat dari para *Muzakki* untuk dibagikan kepada para mustahik yang ada di kecamatan jelai. Sedangkan dalam pengorganisasi dan pengawasannya badan amil zakat kecamatan jelai melibatkan unsur masyarakat, terdiri dari tokoh agama serta instansi terkait dalam pengawasannya badan amil zakat kecamatan jelai juga melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah ranting kecamatan Jelai.

Mengenai persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan badan amil zakat kecamatan Jelai, menunjukan bahwa masyarakat kurang percaya dengan kinerja lembaga pengelolaan zakat tersebut. Karena pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat kecamatan jelai belum dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga masyarakat berzakat secara langsung kepada para *mustahiq*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Faisial Al-Amien, pada tahun 2013 dengan judul penelitian “Pengumpulan Harta Zakat di Kota Palangka Raya”.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisal Al-Amien berfokus terhadap pemungutan harta zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) kota Palangka Raya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Bagaimana perencanaan pemungutan harta zakat pada BAZ kota Palangka Raya?

⁹M. Faisal Al-Amien, “Pengumpulan Harta Zakat Di Kota Palangka Raya”, *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2013, t.d.

- b. Bagaimana pelaksanaan pemungutan harta zakat oleh BAZ kota Palangka Raya?

Kesimpulan dari penelitian ini adalah BAZ kota Palangka Raya belum melakukan perencanaan memungut harta zakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya luasnya ruang lingkup kota Palangka Raya, tidak adanya data mengenai jumlah *Muzakki* secara keseluruhan, minimnya jumlah anggota yang aktif dalam organisasi, tidak adanya laporan atau koordinasi dari lembaga zakat yang berada di naungan BAZ kota Palangka Raya. Adapun perencanaan yang dimiliki BAZ kota Palangka Raya untuk menjalankan program kerja yaitu melakukan pembinaan dan pengumpulan harta zakat dari UPZ, mengadakan penyuluhan pada masyarakat dan lain sebagainya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Khaerany pada tahun 2013 dengan judul penelitian “Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan *Muzakki* Dan Amil Zakat Pada Dompot Dhuafa Sulsel)”. Penelitian yang dilakukan Rizky Khaerany berfokus pada menganalisis pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dompet dhuafa Sulsel serta pengaruh kualitasnya.¹⁰

Berdasarkan judul penelitian di atas rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pandangan *Muzakki* dan amil zakat mengenai akuntabilitas, transparansi, dan kualitas Dompot Dhuafa Sulsel ?

¹⁰Rizky Khaerany, “Akuntabilitas Dan Transfaransi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan *Muzakki* Dan Amil Zakat Pada Dompot Dhuafa Sulsel)”, *Skripsi*, Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2013, <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4804?show=full>, diakses pada tanggal 31 maret 2016 pukul 20.00 WIB.

- b. Apakah akuntabilitas dan transparansi keuangan mempengaruhi kualitas Dompot Dhuafa Sulsel?

Dari hasil penelitian tersebut mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam pandangan *Muzakki*, pelaksanaan konsep akuntabilitas dan transparansi Dompot Dhuafa Sulsel sudah baik. Kualitas Dompot Dhuafa Sulsel juga sudah baik.
 - b. Dalam pandangan amil zakat, pelaksanaan akuntabilitas Dompot Dhuafa sudah baik dan pelaksanaan transparansinya sudah sangat baik. Kualitas Dompot Dhuafa Sulsel juga sudah sangat baik.
 - c. Ditinjau dari perspektif Islam, pelaksanaan akuntabilitas Dompot Dhuafa belum begitu maksimal karena penyaluran zakat hanya terfokus pada golongan fakir dan miskin, belum disalurkan secara maksimal kepada enam golongan lainnya yaitu amil, gharimin, riqab, muallaf, Ibnu Sabil, dan Fii Sabilillah.
 - d. Akuntabilitas maupun transparansi secara parsial memiliki peranan atau pengaruh yang signifikan terhadap kualitas Dompot Dhuafa Sulsel.
 - e. Akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki peranan atau pengaruh yang signifikan terhadap kualitas Dompot Dhuafa Sulsel.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Munirul Hakim pada tahun 2014 dengan judul penelitian “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat *Muzakki* di Rumah Zakat Cabang

Semarang”¹¹ penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Munirul Hakim berfokus pada apakah Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan zakat berpengaruh terhadap minat *Muzakki* di rumah zakat cabang Semarang secara *parsial* maupun *silmultan*. Rumusan masalah yang penelitian Muhammad munirul hakim sebagai berikut :

1. Apakah transparansi pengelolaan zakat mempengaruhi terhadap minat *Muzakki* di Rumah Zakat Cabang Semarang?
2. Apakah akuntabilitas pengelolaan zakat mempengaruhi terhadap minat *Muzakki* di Rumah Zakat Cabang Semarang?
3. Apakah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat secara bersama-sama mempengaruhi terhadap minat *Muzakki* di Rumah Zakat Cabang Semarang?

Sedangkan kesimpulannya transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat *Muzakki* di Rumah Zakat Cabang Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan F hitung (34,530) dengan tingkat probabilitas 0,000 yang berarti secara bersama-sama transparansi dan akuntabilitas mempunyai andil dalam mempengaruhi minat *Muzakki* Rumah Zakat Cabang Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah *Muzakki* dari tahun ke tahun yaitu: tahun 2011 sebanyak 2.232 orang, tahun 2012 sebanyak 2.832 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 3000 orang serta dana yang terkumpul yaitu: tahun 2011 sebesar Rp. 2.337.414.800, tahun 2012 sebesar Rp.2.731.089.025 dan pada tahun

¹¹Muhammad Munirul Hakim, “ Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat *Muzakki* di Rumah Zakat Cabang Semarang”, *Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, diakses pada tanggal 23 april 2016.

2013 sebesar Rp. 3.530.000.000. dengan ini demikian transparansi dan akuntabilitas mampu mempengaruhi *Muzakki* secara signifikan serta memberikan dampak positif terhadap lembaga untuk menjaga profesionalisme.

Tabel 1
Persamaan dan perbedaan

No	Nama dan Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Imbron Hamzah, Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara)	Sama-sama mengkaji mengenai zakat serta dari kesimpulan penelitian ini adanya hal yang berkaitan dengan persepsi masyarakat mengenai akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan transparansi badan amil zakat.	perbedaannya peneliti lebih mengenai pertanggungjawaban dan transparannya lembaga Amil zakat di Kota Palangka Raya sedangkan Imron Hamzah meneliti menyeluruh tentang Pengelolaan zakat yang di Badan Amil Zakat di kabupaten Sukamara.
2	M. Faisal Al-Amien, Pengumpulan Harta Zakat di Kota Palangka Raya.	Sama-sama mengkaji mengenai zakat yang ada di kota Palangka Raya.	perbedaannya adalah peneliti memfokuskan pada pertanggungjawaban lembaga dan keterbukaan lembaga mengenai harta zakat yang diperoleh sedangkan M. Faisal Al-Amien lebih terhadap pemungutan Harta zakat oleh BAZ kota Palangka Raya dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
3	Rizky Khaerany, Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Lembaga	Sama-sama mengkaji Akuntabilitas dan Transparansi lembaga amil zakat.	perbedaannya peneliti berfokus di Rumah peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya dari 3 sudut pandang yaitu <i>Muzakki</i> , lembaga amil zakat serta tokoh masyarakat dan penelitian kualitatif sedangkan Rizky Khaerany

	Amil Zakat (Pandangan <i>Muzakki</i> Dan Amil Zakat Pada Dompot Dhuafa Sulsel)		meneliti di Dompot Dhuafa Sulsel melalui 2 sudut pandang yaitu <i>Muzakki</i> dan amil zakat, penelitian kuantitatif.
4	Muhammad Munirul Hakim, Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat <i>Muzakki</i> di Rumah Zakat Cabang Semarang	Sama-sama mengkaji pertanggungjawaban dan kertebukaan pengelolaan zakat.	perbedaannya adalah peneliti berfokus di Kota Palangka Raya dan hanya meneliti Akuntabilitas dan Transparansi sedangkan Muhammad Munirul Hakim meneliti Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan zakat berpengaruh terhadap minat <i>Muzakki</i> di rumah zakat cabang Semarang secara <i>parsial</i> maupun <i>silmultan</i> .

B. Deskripsi Teoritik

1. Konsep Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan pertanggungjawaban.¹² Sedangkan di dalam kamus baru kontemporer juga memiliki arti yang sama yaitu pertanggungjawaban.¹³

Menurut Ensiklopedia Administrasi, Akuntabilitas adalah kesadaran seorang pejabat untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri tanpa melihat ada atau tidak ada pejabat atasannya.¹⁴

¹²Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h 25.

¹³ H.S Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemorer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, h. 13.

¹⁴ The Liang Gie, dkk, *Ensiklopedia Administrasi*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1989, h. 3.

Berbicara mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Pada tataran ini, konsep mengenai akuntabilitas dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh masyarakat.

Sejumlah regulasi mengenai pengelolaan keuangan Organisasi Pengelola Zakat, telah tersedia seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011 Bab VIII pasal 21 Ayat 1 yang dikuatkan oleh KMA Depag RI No. 581 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan teknis atas ketersediaan audit laporan keuangan lembaga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dan juga aturan yang dikeluarkan oleh PSAK (Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan) No.45 tentang akuntansi Organisasi nirlaba. Seharusnya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) diharapkan bisa lebih baik, sehingga kepercayaan masyarakat *Muzakki*

kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat. Ternyata regulasi belum bisa meyakinkan publik bahwa pengelolaan keuangan Lembaga Amil Zakat sudah dilakukan dengan semestinya.

Objek pengaruh penerapan akuntansi dana terhadap akuntabilitas keuangan Lembaga Amil Zakat adalah dalam hal informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang menerapkan akuntansi dana agar lebih mudah dipahami *stakeholders*¹⁵ mengenai sumber dan penggunaan setiap dana. Sedangkan Aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas keuangan Lembaga Amil Zakat karena informasi yang diberikan dari laporan keuangan akan kurang bermanfaat jika publik memiliki kesulitan untuk mengakses laporan tersebut.

Dengan demikian, Lembaga Amil Zakat yang akuntabel adalah lembaga yang mampu membuat laporan tahunan yang memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan dan laporan tersebut dapat secara langsung tersedia dan aksesibel bagi para pengguna potensial. Jika informasi pengelolaan Lembaga Amil Zakat tersedia dan aksesibel, maka hal ini akan memudahkan *stakeholder* mendapatkannya dan melakukan pengawasan. Jika kondisinya demikian, maka pihak manajemen Lembaga Amil Zakat akan tertuntut untuk lebih akuntabel.¹⁶

¹⁵Stekholder adalah pihak yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari kegiatan organisasi secara keseluruhan yang termasuk didalamnya pemilik atau pemegang.

¹⁶Agus Sucipto, “Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat”, <http://bazkabgarut.blogspot.co.id/2011/04/membangun-transparansi-dan.html>, diakses pada tanggal 1 April 2016 pukul 16:00 WIB.

b. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas biasanya akan dilihat dari sudut *stakeholder* teori yang merupakan pengembangan dari teori Keagenan (agensi teori) dimana pertanggungjawaban dari Teori agensi menekankan pertanggung jawaban dari Agen (Manajer/pelaksana) kepada prinsipal (yang memberikan wewenang) kemudian prinsipal yang merupakan *stakeholder* telah berkembang kepada seluruh interest group (semua pihak yang berkepentingan) walau lingkup pertanggungjawaban ini lebih sempit dari sudut amanah namun latar belakang teori pertanggungjawaban yang lazim digunakan oleh perusahaan yang berorientasi laba dapat menjadi cermin bagaimana seharusnya Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Infaq Shadakah.¹⁷

Wujud akuntabilitas yang dapat dilakukan Badan Amil Zakat Infaq Shadakah antara lain *Disclosures* (pengungkapan-pengungkapan) dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk:

- 1) Menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi.
- 2) Menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial.

¹⁷ Muhammad Rizal, *Akuntabilitas: Dalam Prespektif Islam*, <http://www.laripa.or.id/berita/127-akuntabilitas-dalam-prespektif-islam-.html>, di akses pada tanggal 4 April 2016.

- 3) Menyediakan informasi mengenai manfaat sosial (*social benefit*) dan biaya sosial (*social cost*) yang terjadi akibat operasi perusahaan atau nilai tambah yang diberikan oleh perusahaan (*value add*) untuk jangka waktu atau priode tertentu.¹⁸

Bentuk lain dari pertanggungjawaban dalam laporan keuangan seperti laporan arus cash (*cash flow statement*) yang telah dimodifikasi pada perusahaan non profit, laporan Neraca, dan Laporan Nilai Tambah (*Value add Statement*).

Meskipun laporan-laporan tersebut belum banyak digunakan namun bukan tidak mungkin dilakukan karenanya Visi pengelola Zakat kedepan hendaknya bukan lagi manajemen tradisional, yang terdiri dari orang-orang yang setengah hati dalam bekerja hanya pada bulan Ramadhan, namun diharapkan dikelola oleh praktisi yang profesional hingga pembayaran Zakat pun dapat dilakukan dengan akses cepat seperti lewat ATM, transfer Bank, Pesan Layanan singkat (SMS) Keterbukaan Pengelolaan dalam bentuk transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabel) karenanya peran serta semua pihak sangat diharapkan termasuk peran serta seorang Akuntan yang menjadi penjamin bahwa organisasi telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.¹⁹

2. Konsep Transparansi

a. Pengertian Transparansi

¹⁸Ibid.,

¹⁹ Ibid.,

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kenyataan dan kejelasan (jelas).²⁰ Sedangkan menurut kamus baru kontemporer bahwa transparansi merupakan terbuka, tidak ditutup-tutupi.²¹

Menurut Rahmaniar dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat yang berjudul *Menggali Potensi Umat Melalui Zakat* menyebutkan bahwa Transparansi adalah sifat terbuka dalam pengelolaan melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan, dengan transparannya pengelolaan zakat maka dapat diciptakan sistem kontrol yang baik.²²

Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima kebutuhan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi secara konseptual, transparansi dalam penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ...h. 1209.

²¹H.S Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemorer*,h.382.

²²Rahmaniar, *Menggali Potensi Umat Melalui Zakat (Studi Terhadap Pelaksanaan Zakat Di Kota Palangka Raya)* , Sekolah Tinggi Agama islam Palangka Raya, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 5 nomor 1, 2008, h. 15-16.

disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan.²³

Menurut Zeithaml dan Berry dalam melaksanakan kualitas pelayanan. di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik secara umum didasarkan pada filosofi dari UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Khusus untuk kebijakan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dijabarkan dalam Kep.Menpan RI No.KEP/26/ M.PAN/2/2004. Maksud ditetapkan Keputusan tersebut adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi pelayanan yang meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan teknis dan administratif, biaya, waktu, akta/janji, motto pelayanan, lokasi, standar pelayanan, informasi, serta pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik agar berkualitas dan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.²⁴

Transparansi dibangun dalam suasana adanya aliran informasi yang bebas. Dalam suasana ini, proses, institusi, dan informasi dapat secara langsung di akses oleh mereka yang berkepentingan. Di samping itu, juga tersedia cukup informasi untuk memahami dan memonitor ketiga hal itu. Menurut Riswandha dalam Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan

²³Ahmad Hidayat, *Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia*, <http://kebijakan-publik.blogspot.co.id/2011/03/transparansi-penyelenggaraan-pelayanan.html>, diakses pada tanggal 15 juni 2016.

²⁴*Ibid.*

Good Governance.” Jurnal Otonomi Daerah menyebutkan bahwa transparansi adalah rakyat paham akan keseluruhan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, transparansi itu berarti bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi mensyaratkan bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan dengan yang kegiatan pelayanan.²⁵

b. Teori transparansi

Transparansi merupakan aturan dan prosedur yang diberlakukan untuk membuat pejabat lembaga bertanggungjawab kepada masyarakat umum dan media massa, bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila Undang-Undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan adanya penyalahgunaan untuk kepentingan sendiri.

Transparansi oleh Hardjasoemantri dalam “*Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali” mendefinisikan bahwa:

“seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.”²⁶

²⁵*Ibid.*

²⁶ Lucio Borromeo de Araujo, *Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam local development program di timor-leste*, <http://luckyarezo.blogspot.co.id/2013/05/prinsip-transparansi-akuntabilitas-dan.html>, diakses pada tanggal 9 april 2016.

Dari pengertian transparansi yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian bahwa, prinsip transparansi itu sesungguhnya dibangun atas informasi yang bebas. Bebas diakses oleh siapa saja yang membutuhkan, dan pemerintah berkewajiban untuk membeberkan informasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan segala sesuatu yang diputuskan untuk dilakukan dan tidak dilakukan untuk urusan publik. Kendati demikian, perlu diketengahkan bahwa, lembaga yang transparan tidak saja berarti adanya keterbukaan informasi dan akses masyarakat karena boleh jadi ada informasi yang asimetris, tetapi penekanannya lebih pada makna “tanggung jawab”. Tanggungjawab untuk memberikan informasi yang benar dan relevan kepada yang siapa saja yang membutuhkan atau kepada publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Haryatmoko dalam bukunya *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi* yang memberikan pemahamannya terhadap konsep transparansi bahwa, “organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang relevan atau laporan yang terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri (legislatur, auditor, publik) dan dipublikasikan.”

Dengan pemahaman demikian maka, sesungguhnya transparansi merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah yang sangat rasional untuk menghadapi sistem ekonomi dan administrasi.²⁷

3. Konsep Lembaga Amil Zakat

a. Manajemen Lembaga Amil Zakat

²⁷*Ibid.*,

Lembaga amil zakat dalam sejarah Islam di kenal dengan nama Baitil Maal. Lembaga ini ada sejak Khalifah Umar bin Khaththab, sebagai institusi yang memobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum Dhuafa dan umat pada umumnya berdasarkan syariat.

Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama, namun belum dikembangkan secara professional, karena dalam perjalanannya lembaga ini mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan/ penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada *mustahiq* daripada melalui lembaga zakat.
2. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang idul fitri.
3. Tidak seimbangnya jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikerenakan tidak semua *Muzakki* berzakat melalui lembaga.

4. Terdapat semacam kejemuan di kalangan *Muzakki*, di mana dalam periode waktu yang relative pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana.
5. Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.

Kekhawatiran dan kemungkinan terjadinya hal di atas, yang seharusnya tidak terjadi. Mengingat lembaga zakat itu sungguh akan menjadi tiang agama sekaligus tiang ekonomi dari semua umat manusia di semua dimensi ruang dan dimensi waktu. Selain itu pemerintah juga bertugas dan bertanggungjawab atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.²⁸

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 jonto Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa ada dua organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berasal dari inisiatif masyarakat setempat. Jika dikaitkan dengan perubahan sosial politik di Indonesia, maka Lembaga Amil Zakat yang bermunculan sejak akhir masa Orde Baru merupakan satu respon dari bangkitnya potensi kedermawanan sosial yang tinggi di masyarakat Indonesia yang dipicu oleh krisis ekonomi sejak tahun 1997. Di samping itu, Lembaga Amil Zakat tumbuh sebagai efek dari kecenderungan semakin meningkatnya tingkat keberagaman masyarakat Islam Indonesia seiring dengan semakin terakomodasinya kepentingan Islam khususnya ketika Orde baru hampir berakhir. Lebih dari itu, Lembaga Amil

²⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 64-66.

Zakat yang memperlihatkan simbol atau identitas keagamaan (Islam) menempati kedudukan yang penting di tengah fakta bahwa masyarakat percaya bahwa berderma merupakan ajaran agama yang memiliki nilai ibadah dan sosial yang sangat tinggi.

Lembaga Amil Zakat adalah instusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Seperti halnya Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dapat dibentuk mulai kecamatan. Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dapat dibentuk oleh ormas Islam, Yayasan, atau swadaya masyarakat yang bertaraf nasional dan beroperasi secara nasional dan dikukuhkan melalui surat keputusan Menteri Agama. Pada tingkat provinsi, Lembaga Amil Zakat dikukuhkan melalui surat keputusan Gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di Provinsi tersebut. Lembaga Amil Zakat provinsi dapat berkedudukan di ibu kota provinsi atau kota/kabupaten lain dalam provinsi tersebut.²⁹

Lembaga amil zakat dijelaskan juga dalam buku *Manajemen Pengelolaan Zakat* bahwa Lembaga Amil Zakat merupakan Institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah, yang terdiri dari Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat dan Lembaga Amil Zakat Tingkat Propinsi.³⁰

²⁹Sjuhada Abduh, dkk, *Regulasi Zakat dan Kesejahteraan Sosial : Studi Legislasi dan Implementasi Perda Daerah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009, h. 108 - 110.

³⁰Departemen RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: 2009, h. 16.

Pengelolaan zakat dikatakan sebuah sistem, karena banyak pihak yang berperan dalam pelaksanaannya. Karena itu, sistem zakat pada dasarnya adalah suatu sistem pengalihan kekayaan (pendapatan atau kepemilikan) dan mobilitas modal untuk pembangunan “kelompok lemah” dalam sistem yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, bahwa sifat dan ciri sistem zakat dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kelompok penerima zakat dalam masyarakat, baik material maupun spiritual.
2. Secara horizontal bahwa sistem zakat dapat menembus segi sosial, ekonomi, keamanan, ilmu/teknologi, akhlak, dan keimanan. Di samping merupakan akhlak bagi pelaksana (*amil*) sistem zakat juga merupakan keimanan bagi pelaksana dan masyarakat luas.
3. Sekalipun kelompok penerima ditetapkan secara khusus, tapi dengan adanya program “*fi sabilillah*”, maka pada dasarnya kemaslahatan umumnya juga merupakan medan yang mendapat tekanan dari sistem zakat ini yang secara langsung juga merupakan kepentingan “kelompok kuat” dalam masyarakat.
4. Agar terlaksanannya sistem zakat yang tepat sasaran, maka aspek manajemen, mulai dari tingkat perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi memegang kunci utama, bahkan terpenting.

Jadi dari uraian di atas, zakat merupakan sebuah sistem pengalihan harta yang terdiri dari bagian mobilisasi pengumpulan dan mobilitas anggaran

dengan pemerintah sebagai pengawas kelancarannya. Hal ini sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengenai partisipasi Negara dalam sistem zakat tersebut untuk mengembangkan kelompok lemah. Di sini terdapat diskriminasi secara tegas dari Negara untuk membela dan melindungi fakir miskin, sekali pun demikian, namun pada hakikatnya tidak lain demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan karena pada kenyataannya secara luar sistem zakat mencakup kepentingan dan akan dinikmati oleh seluruh masyarakat.³¹

b. Asas Pengelolaan Zakat

Dalam menjalankan tugas mengelola zakat, asas yang dipergunakan menurut pasal 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah:

1. Syari'at Islam.
2. Amanah adalah lembaga atau organisasi pengelola zakat harus dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan adalah dalam pengelolaan zakat dilaksanakan agar mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahiq*.
4. Keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
5. Kepastian Hukum adalah dalam pengelolaan zakat terdapat kepastian hukum bagi *mustahik* dan *Muzakki*.
6. Terintegrasi adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.³²

Maka dari itu tujuan adanya pengelolaan zakat adalah: Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan

³¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 44-45.

³² Administrator, www.kemendagri.go.id, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada tanggal 11 April 2016.

Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

c. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat terhadap peraturan.³³ Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran dan peraturan. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama masyarakat. Ditegaskan lagi kepatuhan masyarakat pada hakikatnya merupakan kesadaran dan keetikaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main sebagai konsekuensi hidup bersama, dimana kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang patuh pada hukum, antara *das sein* dengan *das sollen* secara fakta sama.³⁴

Kepatuhan sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis :

³³ Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h

³⁴ Admistrator, <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html>, diakses pada tanggal 1 november 2016.

1. Ketaatan yang bersifat *compliance* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya ia takut kena sanksi
2. Ketaatan yang bersifat *identification* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.³⁵

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi beberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang mentaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* berarti kualitas keefektivan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektivan aturan atau undang-undang. Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan dalam tegaknya segala peraturan dalam masyarakat. Namun selain itu ada faktor penghambat terhadap masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan yaitu eksploitasi ekonomi, terutama dalam saat kritis atau pada saat tekanan ekonomi, maka

³⁵*Ibid.*,

pada tingkat inilah masyarakat akan melakukan pelanggaran guna memenuhi ekonomi.³⁶

Achmad Ali menambahkan jenis ketaatan hukum, yang disebutnya sebagai teori ketaatan hukum karena kepentingan. Menurut Achmad Ali, apabila direnungkan baik-baik, ternyata jika seseorang disodori dengan keharusan untuk memilih, maka seseorang akan menaati aturan hukum dan perundang-undangan, hanya jika dalam sudut pandangnya, keuntungan-keuntungan dari suatu ketaatan, ternyata melebihi biaya-biaya (pengorbanan yang harus dikeluarkannya). Diakui oleh Achmad Ali bahwa pandangannya ini dipengaruhi oleh pandangan mazhab hukum ekonomi, yang memandang berbagai faktor ekonomi sangat memengaruhi ketaatan seseorang, termasuk di dalamnya, keputusan seseorang yang bertalian dengan faktor “biaya” atau “pengorbanan”, serta “keuntungan” jika ia menaati hukum; juga faktor yang turut menentukan taat atau tidaknya seseorang terhadap hukum, sangat ditentukan oleh asumsi-asumsinya, persepsi-persepsinya serta berbagai faktor subjektif lain, demikian juga proses-proses yang dengannya seseorang ia memutuskan apakah ia akan menaati suatu aturan hukum atau tidak. Dalam kaitannya ini, seyogyanya pembuat perundang-undangan, harus peka untuk berupaya dapat melakukan prediksi yang akurat, tentang bagaimana orang-orang yang kelak akan menjadi target peraturan yang dibuatnya, akan bereaksi terhadap peraturan tersebut, dan olehnya itu, pembuat undang-undang

³⁶*Ibid.*,

harus secara optimal memiliki kemampuan menentukan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang ikut membentuk pilihan orang-orang yang akan menjadi sasaran perundang-undangan itu.³⁷

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, Struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat.

Di dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.³⁸

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 347-350.

³⁸ Nur amin saleh, <http://www.nuraminsaleh.com/2016/02/teori-kesadaran-hukum-dan-ketaatan-hukum.html>, diakses pada tanggal November 2016.

Kewajiban moral masyarakat secara individu untuk mentaati hukum, tidak ada yang mengatakan bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang absolut, sehingga terkadang secara moral, kita dapat melanggar hukum, namun tidak ada pakar hukum, yang secara terbuka atau terang-terangan melanggar hukum. Kita memiliki alasan moral yang kuat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum, seperti, tidak melakukan penghinaan, penipuan, atau mencuri dari orang lain. Kita harus mentaati hukum, jika telah ada aturan hukum yang disertai dengan ancaman hukuman. Mereka yang yakin akan hukum, harus melakukan dengan bantuan pemerintah, dan mereka yakin, akan mendapat dukungan dari warga masyarakat.

Kesadaran hukum, terkait dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum, dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut di patuhi atau tidak dalam masyarakat³⁹

Pentingnya teori ini jika dihubungkan dengan penelitian yang penulis teliti bahwa LAZ memang tidak dapat dipisahkan dari sebuah ketaatan hukum yang bersifat patuh, taat, tunduk pada ajaran dan peraturan. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturanguna untuk membangun suatu kepercayaan akan lembaga tersebut dalam visi misi yang menanamkan tanggungjawab dan akuntabilitas.

³⁹Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung : PT Refika Aditama, 2004, h. 153.

4. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang Arab, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* berarti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thahharatu*, “kesucian”, dan *ash-shalahu* “keberesan”⁴⁰. Sedangkan dari segi istilah, Zakat menurut Syara adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan.

Hanafiyah juga mendefinisikan bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang yang telah ditentukan oleh syariah, semata-mata karena Allah SWT. Sedangkan Syafi’iyah berpendapat bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk harta zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Serta menurut Hanabilah bahwa zakat hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.⁴¹

Meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, akan tetapi pada dasar prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Artinya memberikan hak wajib pada harta. Zakat dalam *Urf fuqaha* digunakan juga

⁴⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 7.

⁴¹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih islam wa Adillatuhu jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 165.

untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai hak orang-orang fakir.⁴²

Menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya *Hukum Zakat* bahwa zakat dari segi Fikih merupakan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping itu juga berarti mengeluarkan jumlah tertentu atas diri sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu.⁴³

b. Syarat-Syarat Zakat

Adapun Syarat-syarat zakat adalah sebagai berikut:

1). Beragama Islam

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu, beragama Islam menjadi syarat bagi orang yang hendak menunaikannya. Dalil di bawah ini adalah Rasulullah SAW. memberikan instruksi kepada Mu'adz Ra. untuk mengajak warga Yaman memeluk agama Islam terlebih dahulu dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat, setelah itu dilanjutkan menyampaikan ajaran Islam yang lain termasuk zakat.⁴⁴ Akan tetapi, di akhirat kelak, orang-orang non-muslim akan mendapat siksa dan azab kerana tidak menunaikan zakat. Allah SWT berfirman Alquran surah Fushilat ayat 7:

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

Artinya

⁴² *Ibid.*

⁴³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2007, h. 34.

⁴⁴ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap: Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, Yogyakarta: DIVA Press, 2013, h. 19-20.

(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.⁴⁵

Adapun orang yang murtad, jika kewajiban zakat ada pada dirinya ketika ia masih beragama Islam, kemudian ia keluar dari agama Islam sebelum menunaikan zakat, maka kewajiban zakatnya tidak gugur dan tetap diambilkan dari hartanya.⁴⁶

2). Mencukupi Nisab

Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat harta. Batasan nisab merupakan ukuran penilaian atas kekayaan seseorang. Artinya jika harta seseorang belum sampai pada nisab yang telah ditentukan, maka ia belum dianggap orang kaya dan secara otomatis tidak wajib mengeluarkan zakat.

3). Berlalu Satu Haul Atau Satu Tahun

Disyaratkan untuk kewajiban berzakat berlalunya waktu satu tahun dengan menggunakan penanggalan hijriah untuk kepemilikan harta yang sudah mencapai nisab. Persyaratan berlalunya satu tahun ini tidak berlaku pada zakat biji-bijian, buah-buahan, dan barang tambang. Zakat pada jenis harta ini diwajibkan ketika barang tersebut diperoleh, yaitu ketika barang tambang dikeluarkan, dan biji-bijian serta buah-buahan dipanen.

Imam Nawawi berkata, “harta wajib dizakati itu dua macam. Pertama, harta yang berkembang dengan sendirinya, seperti biji-bijian dan buah-buahan. Maka kewajiban zakatnya adalah ketika harta itu diperoleh. Kedua,

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahannya*...,h. 477.

⁴⁶El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap: Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*...,h. 20-21.

harta yang diawasi perkembangannya, seperti dinar, dirham, harta perdagangan, dan hewan ternak, pada harta jenis-jenis ini disyaratkan haul. Oleh karena itu, tidak wajib zakat pada harta jenis ini bila sudah mencapai nisab sehingga berlalu satu haul. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ahli fiqh.⁴⁷

c. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat mempunyai makna sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian lembaga zakat dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan;
- 2) Membantu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh para gharim, ibnussabil dan mustahiq lainnya;
- 3) Membina dan mengukuhkan tali persaudaraan dan kasih sayang sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
- 4) Menghapus sifat kikir;
- 5) Membersihkan diri dari sifat dengki (kecemburuan sosial) dalam hati orang miskin;
- 6) Menyembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;

⁴⁷*Ibid.*, h. 21-22.

- 7) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan;
- 8) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada ditanganya; dan
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.⁴⁸

d. Dasar Hukum Zakat

Dalil yang menjadi landasan disyariatkannya wakaf terdapat didalam Alquran dan Hadis Nabi serta di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau panduan peraturan zakat dalam hukum positif Indonesia.

1) Alquran

Alquran membicarakan zakat dan mengaitkannya dengan sholat hampir 82 ayat yang disebutkan di dalam Alquran, namun karena merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Alquran yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui zakat, diantaranya yaitu:⁴⁹

QS. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya

⁴⁸Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013, h. 22-23.

⁴⁹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, c. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, h. 103.

dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

QS. Al-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya

ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁵⁰ dan mensucikan⁵¹ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁵²

2) Hadis

Hadis Riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ

⁵⁰ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

⁵¹ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka..

⁵² Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahannya*,,h. 203.

أَغْنِيَاهُمْ فَتَرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ
أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad sahayanya Ibnu 'Abbas radliallahu'anhuma berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berkata, kepada Mu'adz bin Jabal Radhiyalahu'anhu ketika Beliau mengutusnyanya ke negeri Yaman: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab, jika kamu sudah mendatangi mereka maka ajaklah mereka untuk bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaati kamu tentang hal itu, maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu pada setiap hari dan malamnya. Jika mereka telah mena'ati kamu tentang hal itu maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari kalangan orang mampu dari mereka dan dibagikan kepada kalangan yang faqir dari mereka. Jika mereka mena'ati kamu dalam hal itu maka janganlah kamu mengambil harta-harta terhormat mereka dan takutlah terhadap do'anya orang yang terzholimi karena antara dia dan Allah tidak ada hijab (pembatas yang menghalangi) nya."Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad sahayanya Ibnu 'Abbas radliallahu'anhuma berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berkata, kepada Mu'adz bin Jabal Radhiyalahu'anhu ketika Beliau mengutusnyanya ke negeri Yaman: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab, jika kamu sudah mendatangi mereka maka ajaklah mereka untuk bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaati kamu tentang hal itu, maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu pada setiap hari dan malamnya. Jika mereka telah mena'ati kamu tentang hal itu maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari kalangan orang mampu dari mereka dan dibagikan kepada kalangan yang faqir dari mereka. Jika mereka mena'ati kamu dalam hal itu maka janganlah kamu mengambil harta-harta terhormat mereka dan takutlah terhadap do'anya orang yang terzholimi karena antara dia dan Allah tidak ada hijab (pembatas yang menghalangi) nya".⁵³

Hadis Riwayat nasa'i

⁵³ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih AlBukhari Buku 8*, (terjemah Amiruddin), c. II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 296.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ سِرْتُ أَوْ قَالَ أَخْبَرَنِي مَسَارَ مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ وَلَا تَجْمَعَ بَيْنَ مُفَرَّقٍ وَلَا تُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَكَانَ إِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهُ حِينَ تَرُدُّ الْغَنَمَ فَيَقُولُ أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ قَالَ فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا صَالِحٍ مَا الْكَوْمَاءُ قَالَ عَظِيمَةُ السَّنَامِ قَالَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا قَالَ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ إِلَيَّ قَالَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا قَالَ فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَقَبِلَهَا وَقَالَ إِنِّي آخِذُهَا وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِي عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا يُفَرَّقُ

Artinya

Telah menceritakan kepada Kami Musaddad, telah menceritakan kepada Kami Abu 'Awanah dari Hilal bin Khabba dari Maisarah Abu Shalih dari Suwaid bin Ghafalah, ia berkata; aku berjalan -atau ia berkata; telah mengabarkan kepadaku orang yang berjalan bersama petugas pengambil zakat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ternyata pada zaman Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam dikata; janganlah engkau mengambil zakat dari anak yang sedang menetek susu, dan janganlah engkau menggabungkan antara hewan yang dipisahkandan jangan memisahkan antara hewan yang telah dijadikan satu. Dan sesungguhnya air datang ketika kambing datang, kemudian petugas pengambil zakat berkata; Tunaikan zakat harta kalian. Maisarah berkata; kemudian salah seorang diantara mereka mendatangi unta kauma`. Kemudian aku katakan; wahai Abu Shalih, apakah kauma` itu? Ia berkata; yang besar punuknya. Maisarah berkata; kemudian ia enggan menerimanya. Orang tersebut berkata; sesungguhnya aku ingin anda

mengambil unta terbaikku. Maisarah berkata; kemudian ia enggan untuk menerimanya. Maisarah berkata; kemudian orang tersebut menuntun untanya yang lain, lalu petugas zakat tersebut enggan untuk menerimanya, kemudian orang tersebut menuntun untanya yang lain selain unta tersebut, lalu petugas zakat tersebut menerimanya dan berkata; sesungguhnya aku mengambilnya dan aku merasa khawatir Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah kepadaku dan berkata: "Engkau mendatangi seseorang dan memilih unta terbaiknya." Abu Daud berkata; dan Husyaim telah meriwayatkannya dari Hilal bin Khabbab seperti itu, hanya saja ia berkata; tidak dipisahkan.⁵⁴

3) Undang-undang

- a) Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Jonto Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.
- b) Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c) Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis pengelolaan zakat.
- d) PSAK No. 45 tentang Akuntansi Organisasi Nirlaba.

C. Kerangka pikir

Dari judul yang diangkat oleh penulis yaitu “**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)**” dalam manajemen pengelolaan lembaga amil zakat yang telah ada dan tumbuh begitu lama, namun belum dikembangkan secara profesional, karena dalam

⁵⁴Muhammad Nashirudin Al Albani, *Shahih Sunan Nasa'i Jilid 2*, (terjemah fathurahman dan Zuhdi), c. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 292.

perjalanannya lembaga amil zakat mengalami permasalahan yang berupa krisis kepercayaan umat, tidak seimbang jumlah dana yang terhimpun dibandingkan kebutuhan umat, bahkan adanya kekhawatiran politis dalam penggunaan dana umat.

Lembaga amil zakat merupakan Instutisi yang sepenuhnya dibentuk atas prakassa masyarakat dan oleh masyarakat yang dikukuhkan dan bina oleh pemerintah. Dalam pengelolaanya lembaga amil zakat banyak pihak yang berperan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu lembaga amil zakat dituntut harus akuntabel dan tranparan dalam pengelolaanya.

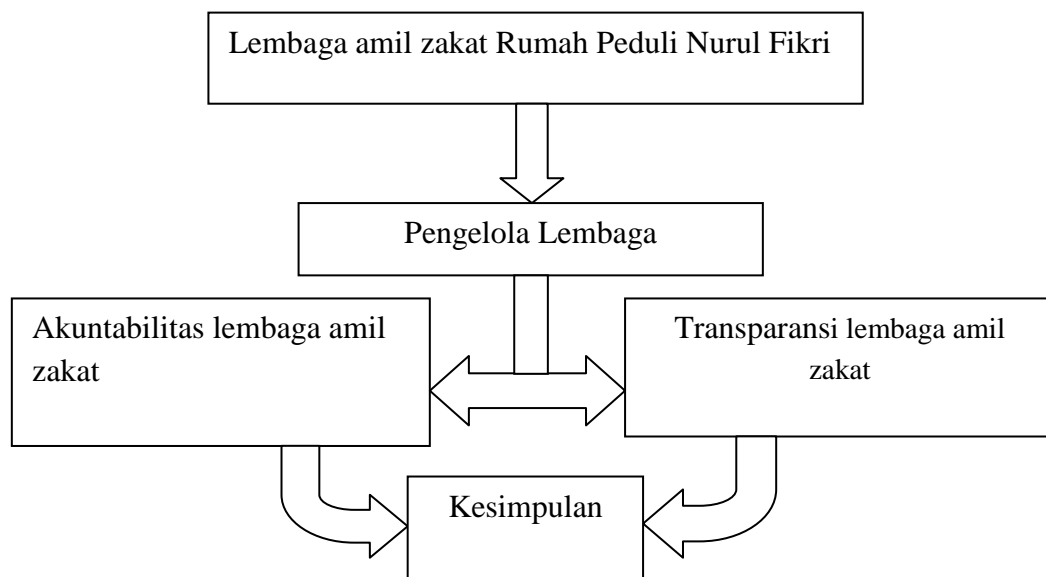
Dalam penelitian yang diangkat penulis ini, penulis lebih menfokuskan kepada pengelolaan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri dalam hal tanggungjawab dan keterbukaan lembaga terhadap dana umat yang diterima. Sebagai mana dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2011 pasal 2 ayat 7 tentang pengelolaan zakat yang berbunyi “akuntabilitas adalah pengeloan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat”. Maka dari itu tujuan adanya pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pananggulangan kemiskinan.

Menurut peneliti hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti lebih mendalam lagi, terutama dalam hal tanggungjawab dan transparansi dari pengelolaan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri.

Kerangka pikir yang telah dituangkan oleh penulis di atas merupakan suatu dasar data yang ada dilapangan untuk lebih jelasnya maka peneliti tuangkan dalam skema sebagai berikut:

Bagian 1

Kerangka pikir



Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanyaan penelitian yang ditujukan untuk akuntabilitas lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri.
 - a. Bagaimana cara Rumah Peduli Nurul Fikri meelaporan keuangan kepada lembaga pengawas?
 - b. Apa saja legalitas Rumah Peduli Nurul Fikri baik secara hukum positif atau secara islam?
 - c. Bagaimana sistem pengelolaan Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri?

2. Pertanyaan penelitian yang ditujukan untuk Transparansi lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri.
 - a. Bagaimana cara Rumah Peduli Nurul Fikri dalam bentuk pelaporan keuangan yang mudah diakses?
 - b. Apakah benar Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri kota Palangka Raya melaporkan keuangan dan kegiatannya?
 - c. Berapa kali penyampaian yang dilakukan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri?
 - d. Bagaimana laporan Rumah Peduli Nurul Fikri dan kapan Rumah Peduli Nurul Fikri melapor?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini awal mengajukan judul sejak bulan juli 2015 dan diterima dengan syarat adanya perubahan yaitu perubahan pada judul penelitian yang awalnya berjudul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)” berubah menjadi “Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)” setelah keluar surat bimbingan penelitian tidak dilanjutkan peneliti dengan alasan adanya kegiatan-kegiatan perkuliahan dalam waktu yang cukup lama kurang lebih 1 tahun. Untuk penelitian pada tahap lanjutan setelah penyelenggaraan seminar proposal dan mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan yaitu Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya hingga penyelenggaraan seminar skripsi.

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini ditahap lanjutan yaitu pelaksanaan atau pencarian data dibutuhkan waktu 1 bulan atau lebih setelah tahap pelaksanaan selesai maka dilanjutkan pada tahap pelaporan atas hasil yang diperoleh pada tahap perencanaan dan pelaksanaan dimana waktu yang diperlukan ditahap ini kurang lebih 1 bulan, jadi dapat waktu keseluruhan penelitian ini selama 1 tahun 2 bulan, dan apabila sewaktu-waktu data sudah terkumpul sebelum batas waktu yang ditentukan, maka penelitian ini dianggap selesai.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk penelitian ini adalah di lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri kota Palangka Raya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Posisi Rumah Peduli Nurul Fikri terletak di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Pengelola Lembaga Amil Zakat (Rumah Peduli Nurul Fikri) kota Palangka Raya peneliti anggap memenuhi syarat dan mampu menjawab permasalahan terkait dengan Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat.
- c. Karena Rumah Peduli Nurul Fikri merupakan bentuk realisasi Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁵⁵ Sedangkan dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris, karena peneliti akan melakukan penelitian terhadap data primer, yakni peran Rumah Peduli Nurul Fikri dalam upaya Akuntabilitas dan Transfaransi lembaga amil zakat.

2. Pendekatan Penelitian

⁵⁵Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 310.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif ialah memberikan data yang seteliti mungkin untuk mempertegas hipotesa-hipotesa dan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵⁶ Maksudnya, seorang penulis harus dapat memahami serta menghayati antara apa yang terjadi dengan apa yang diteliti.

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data tentang Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat di Rumah Peduli Nurul Fikri.

C. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁵⁷ Data primer dalam penelitian ini berupa hasil pengumpulan data dari subjek dan objek penelitian, sedangkan data sekunder berupa berbagai bahan

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 10.

⁵⁷*Ibid.*, h. 51.

ilmu yang terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵⁸

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-undang No.38 Tahun 1999 Jonto Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis pengelolaan zakat, (Pernyataan Standar Akuntansi) PSAK No. 45 tentang Akuntansi Organisasi Nirlaba.

Selain bahan hukum primer tersebut, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier sebagai sumber pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku teks mengenai permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis ataupun disertasi. Adapun yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah hal-hal yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, jurnal, artikel, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁵⁹

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya dari tahun 2015 sampai 2016.

⁵⁸Lihat Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 47-57. Lihat pula Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986. Lihat pula Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Lihat pula Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

⁵⁹*Ibid.*

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah , pimpinan Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri, Staf Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri, *Muzakki* pada Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya dan Relawan Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri sedangkan yang memberikan informasi ada 3 (tiga) informan yang berasal dari BAZNAS, Dinas Sosial dan KEMENAG.

Adapun kriteria menjadi subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Lembaga Amil Nurul Fikri Zakat Center.
- b. Staf Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center dengan kriteria bekerja di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center yang menjadi pimpinan salah satu bidang.
- c. *Muzakki*, dengan kriteria *Muzakki* yang tinggal di kota Palangka Raya dan terus berzakat di Lembaga Nurul Fikri Zakat Center dari tahun 2015.
- d. Relawan, dengan kriteria yang masih aktif menjadi relawan Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center.
- e. Informan dengan kriteria berasal dari lembaga yang menerima laporan Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.⁶⁰ Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan.⁶¹ Sedangkan wawancara yang dimaksud adalah peneliti meminta keterangan melalui dialog secara langsung terhadap para *Muzakki* dan pengelola di Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan peran Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat.

Dalam melakukan wawancara yang menjadi landasan pertanyaan peneliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana cara Rumah Peduli Nurul Fikri melaporkan keuangan kepada lembaga pengawas?
- b. Apa saja legalitas Rumah Peduli Nurul Fikri baik secara hukum positif atau secara Islam?
- c. Bagaimana sistem pengelolaan Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri?
- d. Bagaimana cara Rumah Peduli Nurul Fikri melihat pelaporan keuangan yang mudah diakses?

⁶⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108.

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 135.

- e. Apakah benar Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri kota Palangka Raya melaporkan keuangan dan kegiatannya?
- f. Berapa kali penyampaian yang dilakukan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri?
- g. Bagaimana laporan Rumah Peduli Nurul Fikri dan kapan Rumah Peduli Nurul Fikri melapor?
- h. Apa harapan bapak/ ibu kepada Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri?

Penggalian data melalui wawancara dalam prosesnya yang bermula dari keterangan pimpinan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri kota Palangka Raya dan berlanjut kepada salah satu manager divisi yang kemudian berkembang pada dokumen-dokumen yang berkaitan pada akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri serta kembang pada penggalian data pada informen yang mana ada 4 lembaga dari informen ini ada 3 lembaga yang dapat penulis wawancara.

Berlanjut pada wawancara pada *Muzakki* dan relawan penulis yang dapatkan dalam menggali data yang menurut penulis berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat dalam prosesnya penulis mendapatkan data-data *Muzakki* dan relawan dari pimpinan dan manager divisi marketing lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri.

2. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian

dilakukan pencatatan.⁶² Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.⁶³

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.⁶⁴ Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan yang terus menerus terjadi.

Pelaksanaan observasi dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi langsung, observasi tidak langsung dan observasi partisipasi. Observasi langsung adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti secara langsung (tanpa perantara). Observasi tidak langsung adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu objek melalui perantara, yaitu dengan alat atau cara tertentu. Observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang menjadi objek penelitian.⁶⁵

⁶²Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, h. 63. Lihat pula pada: Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, cet. II h. 62.

⁶³Djunaidi Ghoni dan Fauzan Al-Mansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 165.

⁶⁴Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 224.

⁶⁵Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, *panduan praktis memahami penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 85.

Alat pengumpulan data dalam teknik observasi berupa catatan informal, daftar cek, skala penilaian, dan pencatatan dengan alat. Catatan informal merupakan catatan data yang biasa dilakukan dalam observasi yang tidak berstruktur. Daftar cek (*check list*) merupakan pencatatan data yang dilakukan dalam observasi berstruktur yang didalamnya aspek-aspek atau dimensi yang diamati disusun dalam bentuk daftar atau tabel. Daftar cek digunakan apabila peneliti ingin mengetahui keberadaan setiap aspek yang diamati.⁶⁶

Proses observasi dalam penelitian ini penulis lakukan yang mana penulis langsung turun kelapangan, pada saat lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri melakukan kegiatan seperti pengajian kitab Riyadhus Shalihin di masjid Raudhatul Janah yang rutin dilaksanakan setiap senin setelah shalat Ashar dan juga observasi terhadap website yang mana disitu terdapat ada bagian web yang perlu diamati seperti halnya dibagian web ada kolom berdonasi untuk pengembangan Ma'had tahfiz kalimantan tengah dari kolom ini setiap pengunjung web melihat berapa dana yang terkumpul dan dapat juga melakukan donasi langsung.

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi catatan-catatan serta buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah

⁶⁶*Ibid.*, h. 87.

setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau penyajian akunting.

Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dalam penerapan metode dokumentasi ini, biasanya peneliti menyusun instrumen dokumentasi dengan menggunakan *check list* terhadap beberapa *variable* yang akan didokumentasikan. Dokumen yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dokumen pribadi yang berisi catatan yang bersifat pribadi, dan dokumen resmi yang bersifat formal. Dokumen dijadikan sebagai data untuk membuktikan penelitian karena dokumen merupakan sumber yang stabil, dapat berguna sebagai bukti untuk pengujian, mempunyai sifat yang alamiah, tidak reaktif sehingga mudah ditemukan dengan kajian isi, di samping itu hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diteliti.⁶⁷ teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data di Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya.

Proses pelaksanaan pengumpulan data yang berupa dokumen penulis melakukan dengan mengembangkan dari wawancara dengan pengelola lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri yang seperti izin

⁶⁷ Ahmad Tanzen, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras, 2011, h. 92-93.

lembaga, laporan, profil lembaga, dan hal yang berkaitan dengan akuntabel dan keterbukaan pengelolaannya.

F. Pengabsahan Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁶⁸ Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁶⁹

Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber⁷⁰, metode⁷¹, penyidik⁷² dan teori (yaitu berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori).⁷³ Selanjutnya, untuk memperoleh tingkat keabsahan data maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J. Moleong bahwa teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan:

(1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3)

⁶⁸ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: DIVA Press, 2010, h. 289.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 178.

⁷¹ Menurut Patton, triangulasi metode memiliki dua strategi yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. *Ibid.*

⁷² *Triangulasi* penyidik, yaitu dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang (rakyat) biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang dapat diperoleh dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari para *Muzakki*, para pengelola dan relawan.
3. Membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen.

G. Analisis Data

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁷⁵

Analisa yang digunakan dalam penelitian *kualitatif deskriptif* ini dilakukan setelah tahapan berikut:

1. Data *Reduction* (reduksi data) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*, h. 103.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷⁶

2. *Data Display* (penyajian data). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami,⁷⁷ serta dalam penelitian hukum juga akan diadakan kualifikasi fakta (*qualification of facts*) dan kualifikasi hukum (*qualification of law*).
3. *Conclusion Drawing/ Verification*, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁷⁸

⁷⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 247.

⁷⁷*Ibid.*, h. 249.

⁷⁸*Ibid.*, h. 253.

BAB IV

PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran tentang Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya

Rumah Peduli Nurul Fikri adalah sebuah lembaga pengelolaan zakat di bawah naungan Yayasan Nurul Fikri berdasarkan akta notaris nomor 1 tanggal 2 April 2007 oleh R.A. Setiyo Hidayat, S.H, yang kemudian diperbaiki dengan akta notaris nomor 35 tanggal 26 Juli 2007 oleh notaris R.A.Setiyo Hidayat, S.H, yang di sahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-3033.HT.01.02.TH 2007. Yang mana isi akta tersebut bahwa Hamdan Kosasih memisahkan harta kekayaan berupa sebidang tanah seluas 320 m² berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di jalan Mutiara/Tjilik Riwut kilometer 4,5 Palangka Raya. Tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku serta izin dari pihak yang berwenang, Hamdan Kosasih mendirikan suatu yayasan dengan nama Yayasan Nurul Fikri yang berkedudukan di Kota Palangka Raya ibukota Kalimantan Tengah dengan tujuan dibangunnya yang bergerak di 3 bidang seperti sosial, kemanusiaan, dan keagamaan.⁷⁹

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-3033.HT.01.02.TH 2007 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2007. Dengan keputusan ini maka ditetapkan berdirinya Yayasan Nurul Fikri selanjutnya secara bertahap yayasan Nurul Fikri juga telah terdaftar sebagai organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan

⁷⁹ Observasi, hari Jum'at tanggal 11 nov 2016.

kegiatan ke Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik untuk mewujudkan tujuan yayasan Nurul Fikri.

2. Profil Rumah Peduli Nurul Fikri

Nurul Fikri zakat center merupakan lembaga zakat infak, sedekah, sosial dan kemanusiaan yang bergerak pada kepedulian dhu'afa (miskin) dan masalah sosial kemanusiaan lainnya yang beralamat Jl. Tingang No.54 Kota Palangka Raya provinsi Kalimantan Tengah. Berdirinya Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri berdasarkan:

1. Rekomendasi BAZNAS Nomor : 093/SET.BAZNAS/01.02/X/2017
2. Terdaftar di Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor: 00-11-00/7/III/2016
3. Terdaftar di Kesbangpol Kota Palangka Raya, Nomor : 300.3.2/552/BKBP/2015
4. Akta Pendirian No. 20 Tanggal 17 Januari 2017 oleh R.A.Setiyo Hidayati, SH dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000115.AH.01.05.TAHUN.2017
5. Surat Keterangan Terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No : PEM-272/WPJ.209/KP.0303/2007.
6. Surat Izin Operasional di Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Nomor : 396/PDS-02/Sos/V/2017.

Dengan Visi Nurul Fikri Zakat Center adalah Terwujudnya masyarakat sadar zakat dalam rangka menciptakan kemandirian ummat atas dasar nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dengan tata kelola yang amanah dan professional.⁸⁰

Untuk merealisasikan visi tersebut Rumah Peduli Nurul Fikri membawa 4 (empat) misi yaitu :

- a. Mewujudkan masyarakat sadar dan gemar berzakat
- b. Mewujudkan sinergi sumberdaya insani
- c. Mewujudkan kemandirian penerima manfaat
- d. Mewujudkan lembaga pengelola zakat yang terdepan, amanah dan professional

Untuk mewujudkan visi misi tersebut Rumah Peduli Nurul Fikri menggunakan konsep oprasional seperti :⁸¹

- 1) Distribusi
- 2) Objek program adalah yang termasuk dalam kategori *mustahik* atau 8 *Ashnaf* (At-Taubah: 60) atau masyarakat miskin berdasarkan kategori yang ditetapkan pemerintah.
- 3) Tidak ada *overlapping* pendistribusian zakat baik antar "Lembaga dan Individu" maupun antar "Lembaga dan Lembaga" (FOZ - Forum Zakat)

b. Produktivitas

⁸⁰ Administrator, 2015, <http://www.rpnf.org/profil-rpnf/> Diakses pada tanggal 10november 201 Pukul 1.53 WIB.

⁸¹ *Ibid.*,

- 1) Mayoritas dana akan dialokasikan pada program produktif, kecuali pada program *disaster rescue* (penanggulangan bencana) dan santunan pada *mustahik* dengan kategori tidak produktif.
- 2) Fokus kepada 3 program produktif:
 - a) Pendidikan,
 - b) Kesehatan dan
 - c) Pemberdayaan Ekonomi.
- 3) Mentargetkan penerima manfaat untuk mandiri dalam jangka waktu tertentu.

c. Pembinaan

- 1) Fokus pada 2 konsep pembinaan yaitu pembinaan program dan pembinaan spiritual.
- 2) Program produktif yang dijalankan selalu dimonitor, dibina dan dievaluasi sehingga hasilnya terukur sesuai target dan memudahkan untuk perbaikan.
- 3) Pembinaan penting lainnya adalah pada pembinaan *spiritual* agar terbentuk kesholehan individu dan kesholehan kolektif.

d. Konsep Transparansi

- 1) Semua program yang dijalankan akan dilaporkan kepada semua *stake holder* (*Muzakki*, Dewan Pengawas dan Lembaga Mitra) secara berkala.
- 2) Lembaga mitra ataupun donatur perseorangan akan difasilitasi untuk bisa mengakses laporan dan laporan program.
- 3) Laporan akan dibuat secara transparan dengan melibatkan *auditor*, *update*, akses yang mudah dan *online*.

Selain hal-hal diatas nurul fikri juga memiliki kategori program untuk mensejahterakan umat diantaranya sebagai berikut:

a. Konsumtif

Program dengan kategori konsumtif adalah dalam bentuk bantuan langsung habis kepada penerima manfaat. Bentuk bantuan dapat berupa uang tunai, barang, atau dalam bentuk bakti sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Contoh dari program ini adalah pemberian santunan kepada para janda tidak mampu, lansia, santunan yatim, bakti sosial khitan, kesehatan, dan lain-lain.⁸²

b. Konsumtif Kreatif

Program dengan kategori konsumtif kreatif adalah program dalam bentuk bantuan tidak langsung habis dan bersifat semi pemberdayaan. Bentuk bantuan dapat berupa beasiswa pendidikan, bantuan perlengkapan alat sekolah, bantuan sarana pendidikan dan lain-lain.

c. Produktif

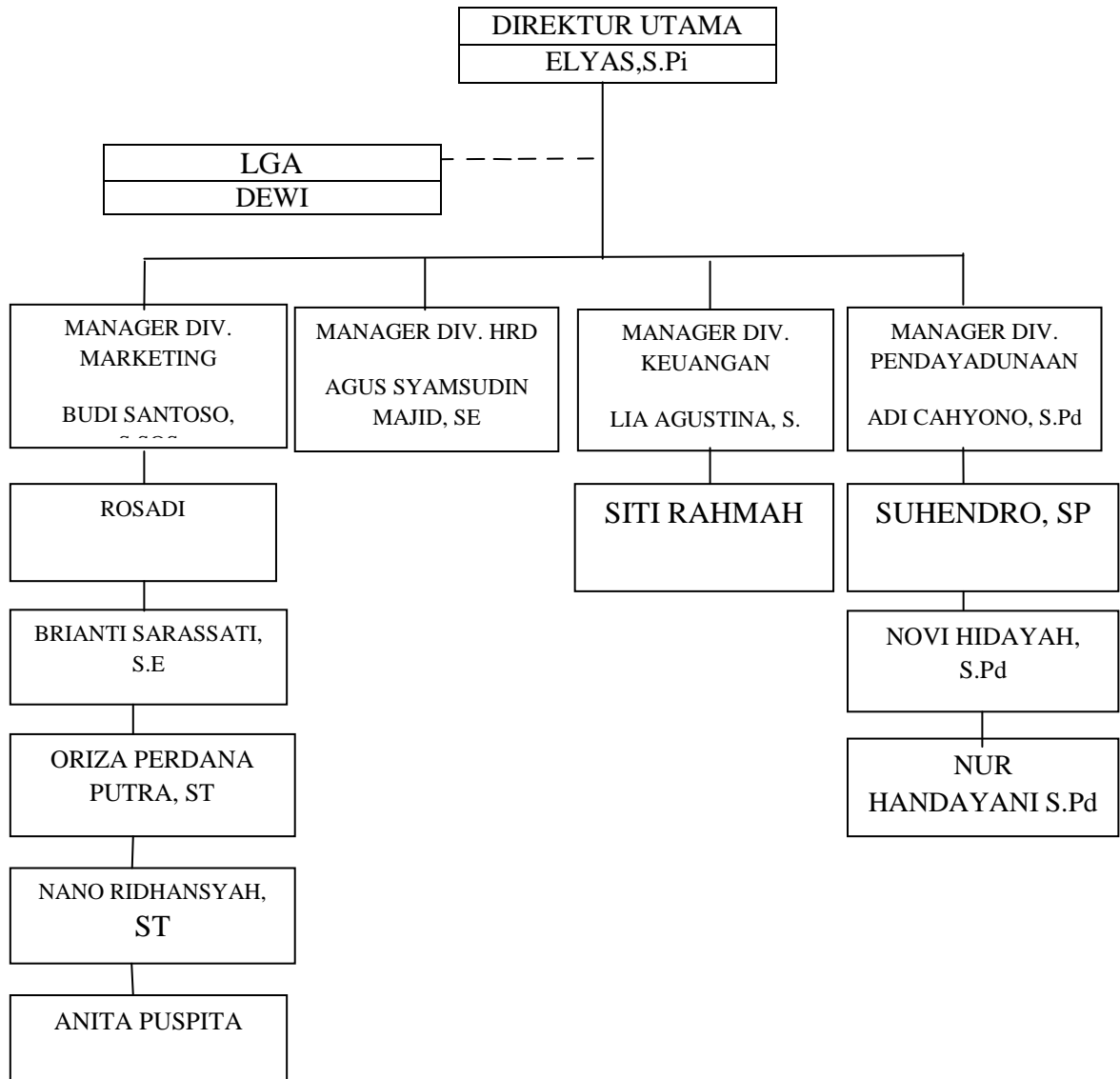
Program dengan kategori produktif adalah program dalam bentuk permodalan tanpa dikenakan bunga dan bagi hasil.

d. Produktif Kreatif

Program produktif kreatif adalah program dalam bentuk pemberian bantuan alat dan atau bahan usaha. Contoh dari realisasi program ini adalah bantuan gerobak usaha, bantuan bibit kambing, bantuan alat pembuatan kue dan lain-lain.

⁸²*Ibid.*,

2. Struktur Organisasi Rumah Peduli Nurul Fikri



3. Program Kerja Rumah Peduli Nurul Fikri

a. *Disaster Risk Managemet* (DRM) adalah program Nurul Fikri Zakat Center dalam bidang pencegahan bencana, bantuan saat terjadi bencana dan bantuan pasca bencana. Bencana-bencana yang saat ini terjadi di Kalimantan Tengah setidaknya ada 3 yaitu bencana kebakaran hutan dan asap, bencana kebakaran

pasar dan pemukiman serta bencana banjir. NF Zakat Center bersama berbagai pihak berkomitmen untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana tersebut.

b. Program Umat Mandiri Nurul Fikri PUM-NF bertujuan untuk memberikan support kepada kegiatan usaha para mustahik produktif dalam bentuk pinjaman modal usaha dengan aqad Al-Qardul hasan atau pembiayaan kebajikan. PUM-NF saat ini berjalan di 3 Kabupaten Kota di Kalimantan Tengah yaitu, Palangka Raya, Sampit dan Kasongan.

c. Program NF *Relationship* adalah program khusus kemitraan dalam hal pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pengelolaan dana CSR ini dapat berupa pengelolaan dana untuk berbagai program baik yang sifatnya *charity, empowering* ataupun *disaster*.

d. Program Cahaya Generasi adalah program Nurul Fikri Zakat Center di bidang pendidikan. Kegiatan yang gencar dilakukan yaitu Program Pemberantasan buta huruf al qur'an melalui pendirian Taman Pendidikan Al Qur'an dan Rumah Tahfidz Sahabat Qur'an. Selain itu juga menyelenggarakan pendidikan PG/TK dan SD Islam Terpadu. Selain itu juga menyalurkan berbagai beasiswa kepada siswa-siswa yatim dan dari keluarga tidak mampu di Kalimantan Tengah. Program ini diantaranya:

e. Program *Charity & Empowering* adalah program Nurul Fikri Zakat Center di bidang sosial. Secara massif Nurul Fikri Zakat Center memberikan santunan dan bantuan kepada fakir miskin dan masyarakat yang tergolong 8 asnaf penerima zakat melalui berbagai kegiatan dan bantuan. Tercatat 12.000 lebih mustahik pada tahun 2015 menerima manfaat program ini.

4. Kelembagaan dan Kedudukan Rumah Peduli Nurul Fikri

Secara kelembagaan Rumah Peduli Nurul Fikri merupakan lembaga yang di bawah naungan Yayasan Nurul Fikri yang berkedudukan di wilayah Kota Palangka Raya yang sekarang sudah mempunyai kantor cabang dan perwakilan di beberapa kabupaten di antaranya :

- 1) Palangka Raya, alamat Jl. Tingang No 45 Telp. 05233220717/
08115211139
- 2) Palangka Raya, alamat Jl. RTA milono KM 4,5 Telp. 05363220711
- 3) Sampit, alamat Jl. A.Yani No. 32 Hp 082148078185
- 4) Kasongan , alamat Jl. Tjilik Riwut (Halalmart) Hp. 08567291828
- 5) Pulang pisau, alamat Jl. Pembangunan No 46 Hp. 081349122832
- 6) Kapuas, alamat Jl. Pemuda Komp Sumber Kurnia Blok B No. 4 Hp
085252861111
- 7) Buntok , alamat Jl. Pelita Raya No. 73 C Hp. 081349691460
- 8) Muara Teweh, alamat Jl. A. Yani Hp. 085249047600
- 9) Gunung Mas, Hp 082351516688
- 10) Kuala Pembuang, alamat Jl. Pramuka Hp. 082329087333

Kedudukan secara Hukum Rumah Peduli Nurul Fikri sudah mendapatkan Akta Notaris No 1 tanggal 2 April 2007, oleh R.A. Setiyo Hidayat S.H dan diperbaiki dengan Akta Notaris No 35 tanggal 26 juli 2007, yang disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-3033. HT. 01.02.TH 2007 serta ada perubahan Akta Notaris No. 71 tanggal 24 Maret 2016 selain Akta Notaris, di atas Rumah Peduli Nurul Fikri juga sudah

mendapat Surat Keterangan Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka dan mendapat Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Kota Palangka Raya.⁸³

B. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus lembaga amil zakat Rumah Peduli nurul Fikri Kota Palangka Raya. Rumah Peduli Nurul Fikri merupakan lembaga zakat infak, sedekah, sosial dan kemanusiaan yang bergerak pada kepedulian dhu'afa (miskin) dan masalah sosial kemanusiaan yang dimana lembaga ini melakukan mengumpulkan, menghimpun, dan mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq*, untuk lebih jelasnya penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel II
Subjek Penelitian

No	Nama Inisial	Umur	Pendidikan	Alamat	Ket
1	ES	36 Thn	S1	Jl. G.obos 27	Pimpinan Rumah Peduli Nurul Fikri
2	BS	38 Thn	S1	Jl.Jati Indah No. 16	Manager div Marketing
3	EI	32 Thn	S1	Jl. G.obosXIII blok B no. 9	<i>Muzakki</i>
4	RD	30 Thn	S1	Jl. Anggrek II no. 03	<i>Muzakki</i>
5	ST	35 Thn	S1	Jl. Samudinaman no.3b	<i>Muzakki</i>

⁸³*Ibid.*,

6	M H	22 Thn	Mahasiswa	Jl. Putri junjung buih no.02	Relawan
7	BM	21 Thn	Mahasiswa	Jl. Panenga raya no. 31	Relawan

Dalam pelaksanaan langkah awal proses penelitian lapangan, penulis melakukan observasi dan pengumpulan keterangan atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Untuk mendapatkan informasi mengenai akuntabilitas dan transparansi di lembaga amal zakat Rumah peduli Nurul Fikri kota Palangka Raya. Maka, di dapat 7 (tujuh) orang yang menjadi subjek penelitian.

C. Pemaparan Data

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri kota Palangka Raya selama 2 bulan setelah dikeluarkannya surat izin riset dari fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah dan terdapat beberapa pertanyaan yang peneliti kemukakan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi lembaga amal zakat rumah peduli nurul fikri kota palangka raya. Berikut adalah pemaparan berasal dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap subjek yang berpropesi sebagai pengelola lembaga dan pengawas lembaga amal zakat.

1. Akuntabilitas lembaga amal zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya

a. Subjek I

Nama : ES

Umur : 36 Tahun

Alamat : jl. G.obos 27

Jabatan : Pimpinan Rumah Peduli Nurul Fikri

Pada hari jum'at, tanggal 11 November 2016 pada pukul 09:00 melakukan wawancara dengan ES tentang Akuntabilitas lembaga amil zakat adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

1) Apa latar belakang berdirinya lembaga amil zakat rumah peduli nurul fikri?

“awal berdirinya nurul fikri untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan zakat, untuk memberdayakan ekonomi umat, dan menjalin ukhuwah sesama ummat serta sebagai wadah yang membantu dan membentuk kemandirian masyarakat”⁸⁴

2) Bagaimana cara atau bentuk pelaporan keuangan kepada lembaga pengawas dan para *Muzakki* ?

“Laporan ke pengawas atau *stakeholder* pertama kepada mitra jadi kategori kerjasama kemitraan yang bersifat kegiatan insidental atau orderan wajib melaporkan langsung dalam satu buku laporan baik itu laporan keuangan atau laporan kegiatan. Sedangkan Kepemerintah, Nurul Fikri sendiri untuk pemerintahan dilakukan 1 x 1 semester atau bisa juga menyesuaikan kadang pengawas minta mendadak. Laporan untuk pengawas ditujukan Dinas sosial, Dinas pendapatan daerah, Kemenag dan Baznas, dari sekian laporan tadi ada juga laporan yang berupa personal atau grup yang ditujukan untuk *Muzakki* melalui media sosial Whatapp dan SMS langsung dalam waktu yang hampir sama dengan *stakeholder* tapi bedanya kalau laporan ke *Muzakki* hanya jumlah keseluruhan dana yang terhimpun dari seluruh relawan ”

3) Apa saja legalitas rumah peduli nurul fikri baik secara hukum positif atau secara Islam?

“Izin dari dinas sosial kota Palangka Raya dan Provinsi Kalimantan tengah, Izin penggalangan dana dan barang badan perizinan terpadu kota Palangka Raya dan Provinsi Kalimantan tengah, Izin dari Badan Kesatuan Bangsa Dan

⁸⁴ Wawancara yang dilakukan terhadap ES di kantor Lembaga Amil Zakat Ruamah peduli Nurul Fikri pada 11 Nov 2016 pukul 09:00 WIB.

Politik Kota Palangka Raya, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Izin kantor pelayanan pajak, Dan Akta Notaris oleh R.A. Setiyo Hidayah, S.H. Adapun secara Islam sangat jelas dalam Al-Qur'an surah sebagai berikut;⁸⁵
Al-baqarah 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya:

dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan[95] agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

At-taubah 34

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيُصْذَرُونَ ۚ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan

⁸⁵ Wawancara yang dilakukan terhadap ES di kantor Lembaga Amil Zakat Ruamah peduli Nurul Fikri pada 11 Nov 2016 pukul 09:00 WIB.

Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

At-taubah 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁸⁶ dan mensucikan⁸⁷ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

b. Subjek II

Nama : BS
Umur : 34 Tahun
Pendidikan : S1
Alamat : Jl.Jati Indah No. 16
Jabatan : Manager div Marketing

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan BS di Kantor Rumah Peduli Nurul Fikri kota Palang Raya pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 pada pukul 10:00 dari hasil wawancara dengan BS ada beberapa point yang dijelaskan tentang Akuntabilitas diantaranya:

⁸⁶Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda.

⁸⁷Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

1) Bagaimana cara atau bentuk pelaporan keuangan kepada lembaga pengawas?

“Pertama disampaikan kepada donatur kedua Nurul Fikri laporan bazda kota dan provinsi kemudian disampaikan kemenag kota dan provinsi selanjutnya disampaikan ke dinas sosial dan kedinas pendapatan daerahserta dalam bentuk Bulletin board system (BBS) dan ke yayasan sendiri. Laporan keuangan bisa seperti laporan semacam kegiatan dan juga laporan keuangan. Selain ke 6 bentuk laporan tadi, laporan juga dipublik ke web.Nurul Fikri transfara kalau masalah keuangan.”⁸⁸

2) Bagaiman cara atau bentuk pelaporan kepada *Muzakki*?

“Laporan kepada *Muzakki* ada dua yang pertama berupa pemberitahuan yang disampai melalui media sosial secara sekilas terus yang kedua kami menyampaikan kepada *Muzakki* berupa laporan yang lengkap yang kami buat diwebsite.”

3) Apa saja legalitas Rumah Peduli Nurul Fikribaik secara hukum positif atau secara islam?

“Nurul Fikri Zakat Center adalah lembaga zakat, infak dan sedekah yang bernaung di bawah Yayasan Nurul Fikri Palangka Raya dengan Akta Pendirian No 35 Tanggal 26 Juli 2007 oleh R.A.Setiyo Hidayati, S.H dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-3033.HT.01.02.TH.2007 serta Surat Keterangan Terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No : PEM-272/WPJ.29/KP.0303/2007.

Yayasan Nurul Fikri sendiri sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Badan KESBANGLINMAS Kota Palangka Raya Nomor : 300.3.2/552/BKBP/ XII/2015 serta Surat Keterangan Terdaftar di Dinas Sosial Kota Palangka Raya Nomor 023/1034/PKSLK/Dinso. Dan saat ini sedang dalam proses mendapatkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia di Jakarta.”

c. Subjek III

Nama : EI

Umur : 32 Tahun

⁸⁸ Wawancara yang dilakukan terhadap BS di kantor Lembaga Amil Zakat Ruamah peduli Nurul Fikri pada 15 Nov 2016 pukul 10:00 WIB.

Alamat : jl. G.obos XIII

Jabatan : *Muzakki*

Pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 pada pukul 16:00 WIB penulis melakukan wawancara dengan EI di kediaman *Muzakki* berikut hasil wawancara dengan EI yang dilakukan tentang Akuntabilitas lembaga amil zakat.

- 1) Sejak kapan Bapak/Ibu Menjadi *Muzakki* lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri?

“Sejak 2013 hingga sekarang masih aktif berzakat di Rumah Peduli Nurul Fikri tiap bulan.”

- 2) Apa yang melatar belakangi Bapak/Ibu *Muzakki* Rumah Peduli Nurul Fikri ?

“Jadi Dulu dikasih selebaran untuk berzakat, infak dan sadakah buat anak yatim piatu dulu buat infak 75 ribu/bulan kalau tidak salah terus lanjut sekarang zakat penghasilan dan saya tidak berapa persen/bulan tapi saya 228 ribu /bulan digabung penghasilan saya dengan penghasilan suami. Kalau dihitung dari penghasilan saya perbulan itu Cuma 68 ribu/bulan.”

- 3) Berapa rata-rata Bapak/Ibu *Muzakki* berzakat di lembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center?

“Saya Rp. 228.000/ bulan”

- 4) Yang *Muzakki* ketahui bagaimana pertanggungjawaban lembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center?

“Sudah baik kita tiap bulan dapat sms pertanggungjawabannya dapatnya berapa dari lembaga Rumah Peduli Nurul Fikri dapat berapa, terus di website juga untuk segala kegiatannya.”⁸⁹

d. Subjek IV

Nama : RD
 Umur : 30 Tahun
 Alamat : jl. Anggrek no. 03
 Jabatan : *Muzakki*

Pada hari Kamis, tanggal 16 November 2016 pada pukul 13:00 peneliti melakukan wawancara di kantor tempat *Muzakki* bekerja berikut hasil wawancara dengan RD yang dilakukan tentang Akuntabilitas lembaga amil zakat.

- 1) Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi *Muzakki* lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri ?

“Iya saya tergabung di Nurul Fikri Zakat Center sejak tahun 2013 hingga sekarang saya masih aktif berzakat di Rumah Peduli Nurul Fikri”

- 2) Apa yang melatar belakangi Bapak/Ibu menjadi *Muzakki* lembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center?

“Yang menjadi saya tertarik karena pelayanannya ramah, untuk pembayaran zakatnya bisa transfer ke rekening Nurul Fikri Zakat Center, tidak perlu repot dan dari pihak Nurul Fikri Zakat Center mereka bisa jemput zakat langsung ke rumah atau ke kantor langsung.”

- 3) Berapa rata-rata Bapak/Ibu berzakat dilembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center?

⁸⁹ Wawancara yang dilakukan terhadap EI dikediaman suadari *Muzakki* pada 16 Nov 2016 pukul 16:00 WIB.

“Kurang lebih Rp. 120.000/bulan karena saya berzakat dari penghasilan tiap bulan nah itu yang saya jadikan zakat.”

4) Yang *Muzakki* ketahui bagaimana pertanggungjawaban lembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center?

“Iya mereka bertanggung jawab seperti hal penyaluran dana melalui kegiatan-kegiatan sosial misalnya seperti bantuan bencana, pemberantasan buta huruf Al-Qur'an dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang menjadi saya tertarik berzakat di Nurul Fikri Zakat Center.”⁹⁰

e. Subjek V

Nama : ST

Umur : 35 Tahun

Alamat : jl. Samudiaman no.3b

Jabatan : *Muzakki*

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan ST di kediaman *Muzakki* pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 pada pukul 15:00 berikut hasil wawancara dengan ST yang dilakukan tentang Akuntabilitas lembaga amil zakat.

1) Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi *Muzakki* lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri ?

“saya dulu jadi *Muzakki* sejak tahun 2014 masih sampai sekarang aktif tiap bulan berzakat di Rumah Peduli Nurul Fikri”

2) Apa yang melatar belakangi Bapak/Ibu menjadi *Muzakki* lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri?

⁹⁰ Wawancara yang dilakukan terhadap RD di kantor Muzaki bekerja pada 17 Nov 2016 pukul 15:00 WIB.

“ saya tertarik dulu setelah mendapat selebaran yang saya dapat di motor yang dibagi oleh relawan Rumah peduli Nurul Fikri dan setelah saya liat dan baca ternyata itu tentang zakat Rumah Peduli Nurul Fikri dan saya tanyakan lagi lebih lanjut melalui nomor kontak yang ada diselebaran tadi ternyata mereka menjemput zakat langsung ke rumah nah itu yang membuat saya tertarik.”

3) Berapa rata-rata Bapak/Ibu berzakat dilembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center?

“110.000/bulan karena saya berzakat dari gaji saya tiap bulan.”

4) Yang *Muzakki* ketahui bagaimana pertanggungjawaban lembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center?

“bagus mereka bertanggungjawab dari setiap kegiatannya saya melihat di mana-mana melakukan kegiatan dan ada terus di beritakan di websitenya.”⁹¹

f. Subjek VI

Nama : M H

Umur : 22 Tahun

Alamat : jl. Junjung buih no. 02

Jabatan : Relawan

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan M H di kediaman relawan pada , tanggal 23 November 2016 pada pukul 15:00 berikut hasil wawancara dengan M H yang dilakukan tentang Akuntabilitas lembaga amil zakat.

1) Sejak kapan saudara menjadi relawan di Rumah Peduli Nurul Fikri?

⁹¹ Wawancara yang dilakukan terhadap ST dikediamannya pada 17 Nov 2016 pukul 15:00 WIB.

“awal masuk jadi relawan Rumah Peduli Nurul Fikri sekitar tahun 2014 sampai sekarang alhamdulillah masih aktif jadi relawan”

- 2) Apa yang melatar belakangi saudara menjadi relawan di Rumah Peduli Nurul Fikri?

“latar belakang menjadi relawan lembaga amal zakat Rumah peduli nurul Fikri, ingin menambah wawasan, belajar menjalin kerjasama antara relawan, belajar berkomunikasi dalam penawaran zakat”⁹²

- 3) Saat menjadi relawan apakah saudara diberi SK atau adakah perjanjian tertentu dengan lembaga?

“ada SK yang dibuat ketika menjadi relawan lembaga amal zakat Rumah Peduli Nurul Fikri”

- 4) Apakah relawan pernah melihat laporan pertanggungjawaban lembaga amal zakat Rumah Peduli Nurul Fikri?

“sejak menjadi relawan tidak pernah melihat secara langsung laporan yang diberikan ke lembaga seperti ke BAZNAZ tapi yang berupa di situs itu sering”

- 5) Pendapat Relawan bagaimana pertanggungjawaban lembaga amal zakat Rumah Peduli Nurul Fikri?

“ menurut saya cukup bagus lembaga amal zakat rumah peduli nurul fikri bentuk tanggungjawabnya karena mereka terbuka dalam menyalurkan dana yang terkumpul”

⁹² Wawancara yang dilakukan terhadap MH dikediamannya pada 23 Nov 2016 pukul 15:00 WIB.

6) saat melakukan kegiatan apakah relawan digaji?

“iya kami relawan itu di gaji, nah gaji itu sesuai dengan dana zakat yang kami kumpulkan dan untuk berapa persen saya kurang tau”⁹³

g. Subjek VII

Nama : B M

Umur : 21 Tahun

Alamat : jl. Panenga Raya no. 23

Jabatan : Relawan

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan BM di kediaman relawan pada , tanggal 24 November 2016 pada pukul 13:00 berikut hasil wawancara dengan B M yang dilakukan tentang Akuntabilitas lembaga amal zakat.

1) Sejak kapa saudara menjadi relawan di Rumah Peduli Nurul Fikri?

“Dari tahun 2014 sampai sekarang masih jadi relawan”

2) Apa yang melatar belakangi saudara menjadi relawan di Rumah Peduli Nurul Fikri?

“ingin belajar menambah ilmu sosial dan cara berinteraksi dengan masyarakat luar jadi nanti tidak canggung saat sudah berada dimasyarakat dan menambah relasi jadi baik itu di lembaga atau *Muzakki*”

3) Saat menjadi relawan apakah saudara diberi SK atau adakah perjanjian tertentu dengan lembaga?

⁹³Wawancara yang dilakukan terhadap MH dikediamannya pada 23 Nov 2016 pukul 15:00 WIB.

“iya ada SK yang diberikan lembaga sebagai kejelasan relawan jadi kami sebagai relawan tau tugas kami”

- 4) Apakah relawan pernah melihat laporan pertanggungjawaban lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri?

“tidak pernah melihat langsung”

- 5) Pendapat Relawan bagaimana pertanggungjawaban lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri?

“ untuk lembaga saya rasa lembaga amil zakat baik tanggungjawabnya contoh kami relawan diberi SK dan seluruh relawan itu masuk di grup WA khusus relawan”

- 6) saat melakukan kegiatan apakah relawan digaji?

“iya relawan digaji dan itu sesuai dengan berapa yang di dapat waktu mencari zakat”⁹⁴

2. Transparansi lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya

a. Subjek I

Nama : ES

Umur : 36 Tahun

Alamat : jl. G.obos 27

Jabatan : Pimpinan Rumah Peduli Nurul Fikri

⁹⁴Wawancara yang dilakukan terhadap BM dikediamannya pada 24 Nov 2016 pukul 13:00 WIB.

Pada hari jum'at, tanggal 11 November 2016 pada pukul 09:00 penulis melakukan wawancara dengan ES tentang Transparansi lembaga amil zakat adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

1) Bagaimana sistem pengelolaan lembaga rumah peduli nurul fikri?

“Yang pertama Ada sistem organisasi atau sistem kelembagaan. Dia terkait dengan struktur organisasi. Yayasan nurul fikri terutama yang dilembaga zakat itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting dengan pengelolaan zakat ini sendiri seperti unsur kepemimpinan, struktur yang menghimpun dana, struktur khusus penyaluran dan pendayagunaan, struktur pengelolaan administrasi keuangan dan asset, struktur pengelolaan SDM Amil. Dari sisi Penghimpunan atau strategi penggalangan dana nurul fikri menggunakan strategi pritel atau menghimpun potensi yang kecil-kecil. Dari sisi pendayagunaan dan penyaluran ada dua cara atau dua strategi diantaranya konsep pemberdayaan dan konsep penyaluran biasa (charity). Dari sisi administrasi, asset dan keuangan. Terkait dengan sistem keuangan, sistem keuangan nurul fikri menggunakan sistem akuntansi zakat online yang mana akuntansinya sudah berdasarkan PSAK 109 dan PSAK 110. Dari sisi pengelolaan SDM Amil mengenai rekruting dan lain-lain Terlepas dari struktur dan proksi di nurul fikri ada sistem perencanaan yang dilakukan 1x dalam 1 tahun ada rapat kerja, dengan agenda menyusun rencana kegiatan 1 tahun kedepan kemudian menetapkan target penghimpunan dan penetapan target penyaluran dan lain2 terkait pengembangan.

Sistem perencanaan diringi dengan sistem monev (monitoring dan evaluasi) ini nurul fikri lakukan 1x 1 semester agendanya adalah mengevaluasi rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang sudah ditetapkan di sistem perencanaan selain itu ada juga monev tahunan dengan agenda yang sama.”

2) Bagaimana cara atau bentuk pelaporan keuangan yang mudah diakses?

“Pertama nurul fikri secara public 1x 1bulan di website terkait laporan keuangan, kemudian ada laporan kegiatan 1 x 24 jam setelah kegiatan itu dilaksanakan. Misalnya pagi ini dilaksanakan maka paling lambat besok pagi sudah ada di website. Ini sifatnya laporan keuangan online selain itu ada juga yang sifatnya offline diantaranya: Bentuknya adalah laporan fisik yang diterbitkan 1 x 1 semester yang menerima laporan ini hanya donator.

Nurul fikri juga mempunyai laporan melalui media bulletin diterbitkan 1 x 1 tahun diantara sesudah atau sebelum ramadhan tapi sering diterbitkan setelah ramadhan karena isi boletin lebih banyak kegiatan ramadhan.”⁹⁵

⁹⁵ Wawancara yang dilakukan terhadap ES di kantor Lembaga Amil Zakat Rumah peduli Nurul Fikri pada 11 Nov 2016 pukul 09:00 WIB.

b. Subjek II

Nama : BS
 Umur : 34 Tahun
 Pendidikan : S1
 Alamat : Jl.Jati Indah No. 16
 Jabatan : Manager div Marketing

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan BS di Kantor Rumah Peduli Nurul Fikri kota Palang Raya pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 pada pukul 10:00 dari hasil wawancara dengan BS ada beberapa point yang dijelaskan tentang Transparansi diantaranya:

1) Bagaimana sistem pengelolaan lembaga rumah peduli nurul fikri?

“Disini di Nurul Firki bawah yayasan Nurul Fikri lembaga zakatnya disini kita ada tata organisasi nanti bisa dilihat diprofil ada strukturnya nah bisa dilihat disitu.Disitu ada dewan pembinanya ada dewan syariah untuk mengawasi kita dan untuk mananyakan atau rujukan-rujukan karena kita bergerak di ranah syariah, makanya ada dewan syariah untuk masukan-masukan kita.Untuk direkturanya kita ada disitu ada dibantu beberapa bidang agar lebih tertata dan tidak seperti panitia ada divisi masing-masing sehingga bidang-bidang itu melakukan tugasnya masing-masing seperti divisi pemberdayaan, divisi keuangan, divisi penyaluran.”

2) Bagaimana cara atau bentuk pelaporan keuangan yang mudah diakses?

“Kalau dengan donator kita bisa laporan langsung terus ada laporan semacam kegiatan ya laporan keuangan dan kegiatan dan juga selain ke 6 laporan tadi kita juga merilis segala kegiatan di website yang kita publis sebagai bentuk Transparannya, kita transparan aja untuk laporan keuangan dan kegiatan.”⁹⁶

c. Subjek III

⁹⁶ Wawancara yang dilakukan terhadap BS di kantor Lembaga Amil Zakat Ruamah peduli Nurul Fikri pada 15 Nov 2016 pukul 10:00 WIB.

Nama : EI
 Umur : 32 Tahun
 Alamat : jl. G.obos XIII
 Jabatan : *Muzakki*

Pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 pada pukul 16:00 WIB penulis melakukan wawancara dengan EI di kediaman *Muzakki* berikut hasil wawancara dengan EI yang dilakukan tentang Transparansi lembaga amil zakat.

- 1) Apakah lembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan?

“Untuk laporan langsung kita dapat sms tadi dan ada kwutansi juga setelah berzakat.”

- 2) Bagaimana lembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center dalam bentuk laporannya?

“Seperti yang saya dapatkan di sms itu mudah di pahami bagus dan juga setiap saat bisa kita lihat juga di laporan kegiatan di web.”

- 3) Kapan saja lembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center memberikan laporan?

“Kita dapat SMS itu tiap pertengahan bulan tapi kalau di web kapan kita mau aja buat ceknya.”

- 4) Apa harapan *Muzakki* kepada lembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center?

“Selalu ada dan terus berkembang tdak hanya di palangka berkembang menjangkau ke daerah-daerah tertentu terus juga kalau bisa diajak juga yang bisa seperti non-muslim.”⁹⁷

d. Subjek IV

Nama : RD

Umur : 30 Tahun

Alamat : jl. Anggrek no. 03

Jabatan : *Muzakki*

Pada hari Kamis, tanggal 16 November 2016 pada pukul 13:00 peneliti melakukan wawancara di kantor tempat *Muzakki* bekerja berikut hasil wawancara dengan RD yang dilakukan tentang Transparansi lembaga amil zakat.

- 1) Apakah lembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan?

“untuk laporan kami mendapatkan melalui website dan grup WA”

- 2) Bagaimana lembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center dalam bentuk laporannya?

“Bentuknnya mudah saya pahami mereka langsung jumlah yang didapat dari berapa seluruh *Muzakki* yang berzakat dan selain itu kami para *Muzakki* bisa dapat bolettin juga dari Nurul Fikri Zakat Center.”

- 3) Kapan saja lembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center memberikan laporan?

⁹⁷ Wawancara yang dilakukan terhadap EI dikediaman suadari *Muzakki* pada 16 Nov 2016 pukul 16:00 WIB.

“Kalau laporan di WA itu tiap bulan ada. Sedangkan kalau bolettin itu nunggu kita kekantornya atau pada mengantarkan zakat kita dikasih.”

- 4) Apa harapan *Muzakki* kepada lembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center?

“Semoga Nurul Fikri Zakat Center selalu konsisten dalam pelayanan, selalu menemukan ide-ide atau inofasi untuk masyarakat agar gemar zakat”⁹⁸

e. Subjek V

Nama : ST

Umur : 35 Tahun

Alamat : jl. Samudiaman no.3b

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan ST di kediaman *Muzakki* pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 pada pukul 15:00 berikut hasil wawancara dengan ST yang dilakukan tentang Transfaransi lembaga amil zakat.

- 1) Apakah lembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan?

“untuk laporan kami mendapatkan melalui website dan grup WA”

- 2) Bagaimana lembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center dalam bentuk laporannya?

⁹⁸Wawancara yang dilakukan terhadap RD di kantor Muzaki bekerja pada 17 Nov 2016 pukul 15:00 WIB.

“Bentuknya mudah saya pahami mereka langsung jumlah yang didapat dari berapa seluruh *Muzakki* yang berzakat dan selain itu kami para *Muzakki* bisa dapat bolettin juga dari Nurul Fikri Zakat Center.”

- 3) Kapan saja lembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center memberikan laporan?

“Kalau laporan di WA itu tiap bulan ada. Sedangkan kalau bolettin itu nunggu kita kekantornya atau pada mengantarkan zakat kita dikasih.”

- 4) Apa harapan *Muzakki* kepada lembaga amil zakat Nurul Fikri Zakat Center?

“Semoga Nurul Fikri Zakat Center selalu konsisten dalam pelayanan, selalu menemukan ide-ide atau inovasi untuk masyarakat agar gemar zakat”⁹⁹

f. Subjek VI

Nama : M H

Umur : 22 Tahun

Alamat : jl. Junjung buih no. 02

Jabatan : Relawan

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan M H di kediaman relawan pada , tanggal 23 November 2016 pada pukul 15:00 berikut hasil wawancara dengan M H yang dilakukan tentang Transparansi lembaga amil zakat.

- 1) Saat menjadi relawan apa saja tugas yang dilakukan Relawan?

⁹⁹ Wawancara yang dilakukan terhadap ST dikediamannya pada 17 Nov 2016 pukul 15:00 WIB.

“saat menjadi relawan banyak yang dilakukan seperti mengantar surat penawaran zakat ke instansi swasta atau pemerintah bahkan ke pedagang juga; menjemput zakat, infak dan shodaqoh; menyalurkan bantuan kepada mustahiq; membantu kegiatan buka bersama *Muzakki*, mempertemukan dengan para mustahiq sekaligus menyalurkan bantuan.”

- 2) Kapan relawan mengumpulkan zakat untuk Rumah Peduli Nurul Fikri?

“tidak menentu kadang ada pemberitahuan dari lembaga mengambil zakat dialamat yang *Muzakki* tapi sering di 10 hari sebelum Idul Fitri”

- 3) Yang relawan ketahui saat mengumpulkan zakat berapa yang terkumpul?

“untuk jumlah pasti kita kurang tahu jelas tapi biasa bisa dilihat di situs lembaga disitu ada di buat untuk berapa zakat yang terkumpul itu biasa 50 juta keatas mas”

- 4) Yang relawan ketahui kemana Rumah Peduli Nurul Fikri melaporkan segala bentuk pertanggungjawabannya?

“ yang saya tahu itu ke BAZNAS tapi untuk *Muzakki* itu ada grup WA dan disitus lembaga”

g. Subjek VII

Nama : B M

Umur : 21 Tahun

Alamat : jl. Panenga Raya no. 23

Jabatan : relawan

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan BM di kediaman saudara relawan pada , tanggal 24 November 2016 pada pukul 13:00 berikut hasil wawancara dengan B M yang dilakukan tentang Akuntabilitas lembaga amil zakat.

- 1) Saat menjadi relawan apa saja tugas yang dilakukan Relawan?

“Banyak yang kami lakukan seperti menjemput zakat, mengantar surat, menyebarkan surat keterangan yang ingin berzakat dilembaga dan pernah juga ikut menyalurkan bantuan”

- 2) Kapan relawan mengumpulkan zakat untuk Rumah Peduli Nurul Fikri?

“untuk kapan relawan mengumpulkan zakat itu berdasarkan informasi yang diberikan lembaga tapi yang sering waktunya menjelang hari raya idul fitri”

- 3) Yang relawan ketahui saat mengumpulkan zakat berapa yang terkumpul?

“kalau yang terkumpul itu banyak jumlahnya oleh banyak relawan yang mengumpulkan zakat tidak zakat saja tapi infak dan shadakah juga dikumpul oleh relawan.

- 4) Yang relawan ketahui kemana Rumah Peduli Nurul Fikri melaporkan segala bentuk pertanggungjawabannya?

“untuk tanggungjawab rumah peduli itu banyak melapor segala kegiatannya ke BAZNAS, *Muzakki* dan KEMENAG juga”¹⁰⁰

D. Gambaran informan

1	AA	32 Thn	S1	Jl. Sumeru No 32	Dinas Sosial
2	YF	49 Thn	S1	Jl. Pinus Permai II	Kanwil Kemenag Prov Kalteng
3	SN	26	S1	Jl. Mendawai 1	BAZNAS Prov Kalteng

¹⁰⁰ Wawancara yang dilakukan terhadap BM dikediamannya pada 24 Nov 2016 pukul 13:00 WIB.

1. Informan I

Nama : YF

Umur : 49 Tahun

Pendidikan : S1

Alamat : Jl.Pinus Permai II

Instansi : Kanwil Kemenag Provinsi Kalteng

Berdasarkan hasil wawancara dengan YF di Kanwil Kemenag Provinsi Kalteng tentang Akuntabilitas dan Transparansi lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri kota Palangka Raya berikut hasil wawancara yang dilakukan:

1) Apakah benar lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri kota Palangka Raya memberikan laporan keuangan dan kegiatannya ke Kanwil Kemenag Provinsi Kalteng?

Memang kalau masalah laporan lembaga zakat yaitu Rumah Peduli Nurul Fikri memang betul ada laporan masuk untuk waktu pelaporannya itu persemester dan juga perbulan. Memang betul ada laporan Sedangkan untuk pengawasan memang sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa LAZ harus melaporkan ke BAZNAS.

2) Bagaimana laporan Rumah Peduli Nurul Fikri dan kapan Rumah Peduli Nurul Fikri melapor?

Seperti yang dijelaskan tadi nurul fikri memberikan laporan persemester dan perbulan untuk kegiatan sosial

3) Apa harapan bapak kepada Rumah Peduli Nurul Fikri?

Sesuai Undang-undang No 23 Tahun 2011 bahwa lembaga Laz kabupaten atau provinsi itu harus resmi susunan pengurusnya sesuai undang-undang tersebut, batas akhir 25 november nah sementara lembaga zakat nurul fikri masih dalam proses izin resmi rekomendasi dari BAZNAS pusat, sampai ini masih dalam proses Karena masih ada hal yang perlu diperbaiki setelah dapat rekomendasi baru dapat izin, kalau berskala provinsi harus izin Dirjen Bimas Islam kalau berskala kota ini Kanwil Kemenag jadi untuk resmi

lembaga resmi itu. Nurul Fikri belum resmi karena masih dalam proses, sebab sekarang ini kalau tidak resmi tidak berhak mengelola zakat kecuali sifatnya sosial yang lain, terkait fakta yang ada memang lembaga Nurul Fikri ini sangat bagus pengeloanya dan buktinya juga ada tapi terkait masalah izin tadi yang masih dalam proses. Sekarng lembaga nurul fikri terdafr tidak sebagai LAZ resmi hanya terdaftar di Kemenkumham dan Kesbanglinmas tidak ada kaitanya dengan lembaga zakat sekarang harus izin resmi dari pusat dan ada cabang di kabupaten-kabupaten paling tidak ada 3 kabupaten.

2. Informan II

Nama : AA

Umur : 32 Tahun

Pendidikan : S1

Alamat : Jl.Sumeru No 32

Instansi : Dinas Sosial Provinsi Kalteng

Berdasarkan hasil wawancara dengan AA di Dinas Sosial Provinsi Kalteng tentang Akuntabilitas dan Transparansi lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri kota Palangka Raya berikut hasil wawancara yang dilakukan:

1) Apakah benar lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri kota Palangka Raya memberikan laporan keuangan dan kegiatannya ke Dinas Sosial?

Iya memang betul Lembaga Nurul Fikri ada melaporkan keuangannya sesuai izin mereka melaporkan laporannya setiap kadang-kadang setiap bulan dan kadang diakhir izin mereka.

2) Bagaimana laporan Rumah Peduli Nurul Fikri dan kapan Rumah Peduli Nurul Fikri melapor?

Jadi syarat untuk pengumpulan uang dan barang seharusnya melampirkan laporan keuangan kegiatan terakhir jadi secara berkala Nurul Fikri harus wajib melaporkan laporan bulannya jadi akhirnya untuk izin pengumpulan uang dan barang dikeluarkan seperti itu.

Laporan terakhir tanggal 11 mei karena tanggal 12 mei keluar izinnya nanti pada pada saat tanggal 31 desember mereka melaporkan lagi hasil akhir

kegiatan mereka pengumpulan itu, kadang mereka melaporkan perbulan kadang, kadang mereka melaporkan di akhir kegiatan mereka dan melakukan izin baru tentang pengumpulan uang dan barang. Untuk Nurul Fikri itu tidak masalah karena Nurul Fikri sebenarnya secara aturan untuk keagamaan berizin pun tidak, tapi karena mereka menyadari bahwa dengan adanya izin itu dapat meyakinkan masyarakat bahwa pengumpulan uang dan barang ini untuk zakat infak sedekah sudah berizin secara undang-undang mereka bisa tidak berizin tapi karena mereka merasa bahwa perlu perlindungan untuk masyarakat makanya mereka melaporkan.”

3) Apa harapan bapak kepada Rumah Peduli Nurul Fikri?

“Untuk kedepan mereka bisa terus berkembang karena jangan hanya Nurul Fikri harus berizin karena tuh untuk masyarakat terasa terlindungi karena perizininan tidak dipungut biaya tuh untuk keagamaan. Contoh seperti kotak-kotak amal seharusnya mereka berizin ke kota tapi masih ada beberapa yang tidak berizin dan ada juga yang berizin seperti panti asuhan al-amin mereka berizin karena itukan tertera nomor izinnya sebenarnya untuk acara keagamaan tidak apa tidak berizin Cuma, untuk masyarakat tahu bahwa mereka berizin dan melapor keuangannya jadi masyarakat bisa bertanya dan kami mengiyakan bahwa ada laporan mereka selain itu kita juga memantau dan untuk sekarang Nurul Fikri tidak ada masalah.”

3. Informan III

Nama : SN

Umur : 26 Tahun

Pendidikan : S1

Alamat : Jl. Mendawai 1

Instansi : BAZNAS Provonsi Kalteng

Berdasarkan hasil wawancara dengan tentang BAZNAS Provonsi Kalteng Akuntabilitas dan Transparansi lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri kota Palangka Raya berikut hasil wawancara yang dilakukan:

1) Apakah benar lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri kota Palangka Raya memberikan laporan keuangan dan kegiatannya ke BAZNAS Provinsi Kalteng?

“Benar, Rumah Peduli Nurul Fikri melapor laporan akhir tahun dan laporan pendistribusian zakat. Rumah Peduli Nurul Fikri terakhir melapor itu pada bulan ramadhan kemaren”

2) Bagaimana laporan Rumah Peduli Nurul Fikri dan kapan Rumah Peduli Nurul Fikri melapor?

“Rumah Nurul Fikri itu laporannya biasanya per 6 (enam) bulan dan akhir tahun, baik itu kegiatan dan keuangan. Untuk laporan yang lain Nurul Fikri ini juga melaporkan kegiatan Ramadhan yang biasanya setelah Ramadhan kami terima”

3) Apa harapan bapak kepada Rumah Peduli Nurul Fikri?

“Kalau Nurul Fikri itu sosialisasinya sudah tinggi hampir semua masyarakat sudah tahun dan mengenal yang namanya Nurul Fikri ini dan program-programnya juga lebih banyak untuk pengembangan atau untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tidak mampu agar hidupnya lebih baik. Oleh karena itu kami mengharapkan agar ditingkatkan lagi sosialisasi-sosialisasi atau kalau bisa masuk kepedalaman dan daerah yang belum pernah dilakukan sosialisasi”

D. Analisis

Akuntabilitas dan Transparansi lembaga amil zakat akan peniliti uraikan dalam bab ini. Adapun pembahasan dalam bab ini terbagi 2 kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya. Kedua, Bagaimana Transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya.

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang melayani kepentingan publik dalam penghimpunan dan penyaluran dana umat. Sebagai organisasi sektor publik tentu saja Lembaga Amil Zakat memiliki *stakeholder* yang sangat luas.

Konsekuensinya Lembaga Amil Zakat (LAZ) dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada *stakeholder* terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga. Jika keterpercayaan publik kepada lembaga tetap terjaga, maka pada akhirnya masyarakat akan terus menyalurkan dananya lewat lembaga.

Berbicara mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik, lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak pengelola yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak masyarakat yang berada diluar manajemen. Pada tataran ini, konsep mengenai akuntabilitas dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna. dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh masyarakat.

Terkait pelaksanaan audit terhadap Lembaga Amil Zakat, Pasal 18 ayat (2) huruf h Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengatur syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat , salah satunya yaitu bersedia diaudit secara berkala dan pada pasal 19 menyebutkan Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan terhadap subjek I memberikan keterangan bahwa Laporan ke pengawas atau *stakeholder* pertama kepada mitra jadi kategori kerjasama kemitraan yang bersifat kegiatan insidental atau orderan, wajib melaporkan langsung dalam satu buku laporan baik itu laporan keuangan atau laporan kegiatan **lihat lampiran** selain memberikan ke mitra lembaga juga memberikan ke *Muzakki* dalam bentuk laporan di website dan melalui media sosial (Whatapps). Sedangkan laporan lembaga amil zakat Rumah Nurul Fikri memberikan laporan ke lembaga pengawas yaitu Dinas sosial, Dinas pendapatan daerah, Kantor Wilayah Kementerian agama (kemenag) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selain itu subjek II juga memberikan keterangan laporan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri tidak hanya ke 4 (empat) stakeholder tapi juga memberikan laporan ke yayasan dengan waktu pelaporan 1(satu) x 1 (Satu) semester atau bisa juga menyesuaikan kebutuhan stakeholder dan berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 300.3.2/552/BKBP/XII/2015 di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik bahwa wajib menyampailan laporan akhir tahun ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya. **Lihat lampiran**. Sesuai dengan keterangan yang didapat melalui wawancara dengan Informan YF, AA, SN bahwa lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri memang benar melaporkan kegiatan dan keuangan sebagai mana waktu yang telah ditentukan,

Selain itu subjek I dan subjek II juga menerangkan bahwa dasar hukum atau legalitas lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kedudukan secara Hukum Rumah Peduli Nurul Fikri sudah mendapatkan Akta Notaris No 1 tanggal 2 April

2007, oleh R.A. Setiyo Hidayat S.H dan diperbaiki dengan Akta Notaris No 35 tanggal 26 juli 2007, **lihat lampiran** yang disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-3033. HT. 01.02.TH 2007 serta ada perubahan Akta Notaris No. 71 tanggal 24 Maret 2016 **lihat lampiran** selain Akta Notaris, di atas Rumah Peduli Nurul Fikri juga sudah mendapat Surat Keterangan Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka nomor: 00-11-00/07III/2016 dan juga mendapat Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) nomor: 570/04/sosial/V/BPMDP-2016 dari Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Kota Palangka Raya. **Lihat lampiran**

Ditinjau dari sudut pandang teori akuntabilitas bahwa wujud akuntabilitas yang dapat dilakukan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadakah antara lain *Disclosures* (pengungkapan-pengungkapan) dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana. Jadi akuntabilitas lembaga mencakup hal sebagai berikut:

Pertama menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi, berdasarkan data yang peneliti temukan dilapangan dari keterangan diberikan subjek I, II, III IV, V, VI dan subjek VII dan dikuatkan dengan keterangan yang diberikan informan I,II dan III bahwa lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri sudah memenuhi syarat ini baik dengan pemerintah maupun kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dengan adanya laporan seluruh kegiatannya dari laporan langsung kepada lembaga pengawas yakni

BAZNAS sedangkan kepada masyarakat berupa laporan yang diunggah di website dan buletin yang disebar.

Kedua Menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial, berdasarkan laporan yang peneliti dapat bahwa di dalam laporan selain menerangkan jumlah dana tapi segala bentuk kegiatan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri seperti hal seminar, bantuan kebakaran, bantuan banjir. **Lihat lampiran**

Ketiga menyediakan informasi mengenai manfaat sosial (*social benefit*) dan biaya sosial (*social cost*) yang terjadi akibat operasi perusahaan atau nilai tambah yang diberikan oleh perusahaan (*value add*) untuk jangka waktu atau periode tertentu, dalam pelaksanaannya seluruh kegiatannya lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri berdasarkan keterangan Subjek I bahwa kegiatan lembaga dirancang terlebih dahulu dan berapa target dana serta untuk apa saja dana yang dibutuhkan.

Oleh karena itu dari pemaparan diatas dan keterangan-keterangan yang diberikan subjek I, II, III IV, V, VI dan subjek VII dan dikuatkan dengan keterangan yang diberikan informan I,II dan III bahwa lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri. sudah akuntabel serta dari observasi yang penulis lakukan dilapangan.

Sedangkan ditinjau dari sudut pandang teori kepatuhan hukum teori ini jika dihubungkan dengan penelitian yang penulis teliti bahwa Lembaga Amil Zakat memang tidak dapat dipisahkan dari sebuah ketaatan hukum yang bersifat patuh, taat, tunduk pada ajaran dan peraturan. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai

suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan guna untuk membangun suatu kepercayaan akan lembaga tersebut dalam visi misi yang menanamkan tanggungjawab atau akuntabilitas. Oleh sebab itu berdasarkan dokumen yang peneliti dapatkan seperti Akta Notaris No 1 tanggal 2 April 2007, oleh R.A. Setiyo Hidayat S.H yang diperbaiki dengan Akta Notaris No 35 tanggal 26 juli 2007 yang disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-3033. HT. 01.02.TH 2007 dan perubahan Akta Notaris No. 71 tanggal 24 Maret 2016 selain Akta Notaris, di atas Rumah Peduli Nurul Fikri juga sudah mendapat Surat Keterangan Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka nomor: 00-11-00/07III/2016 dan juga mendapat Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) nomor: 570/04/sosial/V/BPMDP-2016 dari Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Kota Palangka Raya. Selain itu dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 19, bahwa kepatuhan hukum Lembaga Amil Zakat juga meliputi wajib melapor kepada BAZNAS.

Berdasarkan analisis penulis di atas, norma yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan zakat mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dalam negara, transparansi pengelolaan zakat, serta pertanggungjawaban secara berjenjang dalam pengelolaan zakat, hal inilah yang menjadi dasar akuntabilitas pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri. Terkait dengan subyek pelaksanaan asas akuntabilitas, serta pengelola zakat pada lembaga amil zakat

Rumah Peduli Nurul Fikri yang berbadan hukum sebagaimana dikuatkan oleh akta notaris dan juga legalitasnya dari Kementerian Hukum dan HAM, yakni lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri sebagai lembaga amil zakat perseorangan dan perkumpulan orang dalam masyarakat dari bentuk badan hukum yayasan kemudian dibentuk lembaga amil zakat dibawah kepengurusan yayasan Nurul Fikri.

Lebih lanjut menurut penulis, pada lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri memiliki tujuan yang sama dengan asas akuntabilitas pengelolaan zakat yaitu tercapainya pelaksanaan asas akuntabilitas adalah sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat dalam undang-undang, yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatnya manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Penegakan hukum berupa sanksi administratif diterapkan dalam kondisi ketika pengelola zakat tidak memberikan bukti setoran zakat, atau pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai ketentuan syariah, atau tidak melakukan pencatatan tersendiri atas penerimaan dana nonzakat, atau tidak memberitahukan pengelolaan zakat yang dilakukan kepada pejabat yang berwenang (khusus amil zakat perorangan dan perkumpulan). Sedangkan sanksi pidana adalah terkait dengan tindakan melawan hukum yang tercantum dalam pasal-pasal larangan pada UU Pengelolaan Zakat, yaitu larangan melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, mengalihkan zakat, infak, sedekah, atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Lebih lanjut berdasarkan kepatuhan hukum, pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri dalam konteks Negara hukum, pengelolaan zakat diatur ke dalam wilayah privat kewarganegaraan dalam sektor keagamaan. Adapun pola pengawasan di dalam masyarakat terhadap pengelolaan zakat sebenarnya sudah ada dan sudah berjalan selama ini, yaitu dalam bentuk yang sangat sederhana melalui peran ulama dan kiyai di tingkat lokal. Tetapi setelah diberlakukannya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, amil zakat diharuskan menerapkan aturan teknis administratif terhadap pelaksanaan ibadah ini. Pada prinsipnya tidak ada masalah jika negara harus masuk dalam pengawasan zakat, yakni untuk mencegah terjadinya pola-pola pengelolaan yang melawan hukum atau penyalahgunaan pengelolaan zakat.

Berdasarkan uraian di atas lebih lanjut menurut penulis, lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri menggunakan pola yang aman dalam pengelola zakat yang akuntabel adalah lembaga amil zakat yang berbadan hukum, ialah meminimalkan risiko hukum pengelolaan dana zakat kepada BAZNAS, yaitu pengumpulan, rekap dan serahkan ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut penulis lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri harus menyeleksi siapa yang wajib menunaikan zakat dan siapa yang berhak menerima zakat. Orang yang berzakat jangan merasa terzalimi, misalnya pegawai yang gajinya pas-pasan jangan diambil zakatnya. Jangan mengambil sesuatu yang tidak wajib. Untuk itu

seorang amil harus memiliki kompetensi dasar sebagai amil zakat, yaitu; ilmu syariah, fiqh zakat, integritas diri, kuat kepribadian, kelembutan, dan adil.¹⁰¹

Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*) terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. Akuntabilitas managerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil analisis penulis, lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri mampu mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Akuntabilitas lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri mampu mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas sangat

¹⁰¹<http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/akuntabilitas-pengelolaan-zakat-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-keuangan/>

penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.¹⁰²

Jadi analisis penulis di atas, akuntabilitas lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri sebagai lembaga amil pengelola zakat sudah akuntabel dengan berbadan hukum dan juga memenuhi prinsip akuntabilitas pengelolaan zakat , yaitu berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas. Hal ini merupakan pemenuhan kepatuhan hukum sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya

Aspek penting dari pengelolaan zakat adalah peran para lembaga amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana itu. Jika amil zakat baik, maka *asnaf mustahik* lainnya *insya Allah* akan menjadi baik. Tapi jika amil zakatnya tidak baik, maka jangan diharap para *asnaf mustahik* yang lain akan menjadi baik. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya.

Secara sosiologis, harapan publik adalah suksesnya pengelolaan zakat yang efektif dan efisien, tetapi seperti segala hal yang merupakan dambaan manusia biasanya memiliki wujud yang abstrak atau tidak jelas. mengenai hal ini salah satu hal yang ingin diintegrasikan dalam proses perancangan adalah

¹⁰²<http://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html>

bagaimana membuat sistem ini menjadi transparan sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Tetapi ketika dicoba untuk dicari *user requirementnya* (daftar kebutuhan pengguna) sebagai basis validasi perancangan timbul kesulitan bagaimana mendefinisikannya.

Selalu tetap ada batasan tentang apa yang bisa diketahui publik dan sebaiknya tidak diketahui publik. Dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dituntut untuk meningkatkan kepercayaan bagi para *Muzakki*, tentunya tidak akan menguraikan rencana strategi kompetitifnya. Seharusnya ada lembaga publik atau otoritas yang ditunjuk dan berani untuk membuat sebuah kriteria yang jelas.

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para *Muzakki* maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri dalam bentuk transparansinya mempunyai 3(tiga) kriteria diantaranya :

1. Semua program yang dijalankan akan dilaporkan kepada semua *stake holder* (*Muzakki*, Dewan Pengawas dan Lembaga Mitra) secara berkala.
2. Lembaga mitra ataupun donatur perseorangan akan difasilitasi untuk bisa mengakses laporan dan laporan program.
3. Laporan akan dibuat secara transparan dengan melibatkan *auditor*, *update*, akses yang mudah dan *online*.

Dari pengertian transparansi yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian bahwa, prinsip transparansi itu sesungguhnya dibangun atas informasi yang bebas. Bebas diakses oleh siapa saja yang membutuhkan, dan pemerintah berkewajiban untuk membeberkan informasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan segala sesuatu yang diputuskan untuk dilakukan dan tidak dilakukan untuk urusan publik. Kendati demikian, perlu diketengahkan bahwa, lembaga yang transparan tidak saja berarti adanya keterbukaan informasi dan akses masyarakat karena boleh jadi ada informasi yang asimetris, tetapi penekanannya lebih pada makna “tanggung jawab”. Tanggungjawab untuk memberikan informasi yang benar dan relevan kepada yang siapa saja yang membutuhkan atau kepada publik.

Dengan pemahaman demikian maka, sesungguhnya transparansi merupakan bentuk akuntabilitas yang sangat rasional untuk menghadapi sistem ekonomi dan administrasi.¹⁰³

Berawal dari konsep transparansi yang peneliti paparkan jika dihubungkan dengan yang peneliti temukan dari hasil observasi dan wawancara dari subjek I, II, III, IV, V, VI dan VII. yang memberikan keterangan sistem organisasi atau sistem kelembagaan yang terkait dengan struktur organisasi. Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri untuk memenuhi kebutuhan penting dengan pengelolaan zakat maka beberapa unsur seperti kepemimpinan, menghimpun dana, penyaluran dan pendayagunaan, pengelolaan administrasi keuangan dan

¹⁰³Lucio Borromeo de Araujo, *Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam local development program di timor-leste,*

asset, pengelolaan SDM Amil. Yang mana unsur-unsur tersebut dibentuk dalam upaya pengelolaan zakat yang tertata dan terbuka.

Sistem keuangan Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri menggunakan sistem akuntansi zakat online yang mana akuntansinya sudah berdasarkan PSAK 109 dan PSAK 110. Dari sisi sistem perencanaan yang dilakukan Rumah Peduli Nurul Fikri adanya rapat kerja, dengan agenda menyusun rencana kegiatan 1 (satu) tahun kedepan kemudian menetapkan target penghimpunan dan penetapan target penyaluran dan lain-lain terkait pengembangan. Sistem perencanaan yang diringi dengan sistem monev (monitoring dan evaluasi). sedangkan laporan keuangan secara public dilakukan perbulan di website, dan juga laporan kegiatan dilaporkan paling lambat 24 jam setelah kegiatan itu dilaksanakan. Selain itu melalui media website lembaga amil zakat rumah peduli nurul fikri menerbitkan bulletin pertahun yang terbitnya diantara sesudah atau sebelum ramadhan.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pasal 34, pembinaan dan pengawasan lembaga amil zakat dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal pembinaan, menurut undang-undang meliputi; sosialisasi, fasilitasi dan edukasi. Sedangkan pengawasan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat, mencakup pelaporan, audit syariah dan audit keuangan. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 pasal 75, menetapkan kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang

dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Melalui audit syariah dapat diketahui dan dipastikan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan badan amil zakat dan lembaga amil zakat telah memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, serta untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat.

Keberadaan dewan pengawas syariah Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri sangat diperlukan selain untuk memberikan kontrol syariah dan pendidikan, dewan pengawas syariah dalam struktur Lembaga Amil Zakat akan meningkatkan kepercayaan terhadap Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri apabila dewan pengawas syariah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Dengan begitu akan memberikan jaminan atas pengelolaan dana zakat sesuai dengan hukum-hukum zakat dan memberikan keyakinan bahwa personil lembaga amil zakat layak sebagai amil zakat selain itu hasil peneliti temukan dari wawancara dengan subjek II bahwa dewan syariah Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul berfungsi mengawasi dan untuk menanyakan atau rujukan-rujukan syariah, adanya dewan syariah mengenai hal yang berkaitan dengan tugas lembaga yang dapat mendorong lembaga amil zakat untuk menciptakan “*good corporate governance*.” Hal ini akan bermanfaat karena dengan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, akan mendorong *Muzakki* menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat, dan tidak lagi disalurkan secara individu masing-masing *Muzakki*.

Pengawasan terhadap lembaga amil zakat sesungguhnya terkait erat dengan program yang direncanakan lembaga amil zakat tersebut, karena itu inti

dari tujuan pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan lembaga amil zakat dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang diprogramkan sehingga zakat benar – benar bisa diberdayakan untuk mengentaskan masalah perekonomian yang ada saat ini. Kepercayaan tersebut harus dibangun melalui akuntabilitas publik melalui pertanggungjawaban keuangan terutama operasional syariah lembaga amil zakat. Tujuan pengawasan haruslah positif, yaitu untuk memperbaiki, mengurangi pemborosan uang, waktu, material dan tenaga. Di samping itu, pengawasan juga bertujuan untuk membantu menegakkan agar peraturan ditaati, sehingga dapat mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri memiliki 3 (tiga) bentuk keterbukaan diantaranya keterbukaan dengan donator berupa laporan langsung kepada donator dan untuk masyarakat melalui bulletin yang terbit sekali setahun serta website yang bisa diakses oleh masyarakat secara bebas dan kepada *Muzakki* laporan yang dilakukan selain melalui website juga dilakukan melalui media sosial (Whatsapps dan SMS) berdasarkan konsep itu dan kenyataan yang ada bahwa lembaga cukup terbuka dengan segala bentuk kegiatan dan keuangan.

Menurut tinjauan teori Transparansi bahwa suatu lembaga yang terbuka mencakup 3 (tiga) aspek yaitu:

Pertama Semua program yang dijalankan akan dilaporkan kepada semua *stakeholder* (*Muzakki*, Dewan Pengawas dan Lembaga Mitra) secara berkala. Dari hasil peneliti dapatkan dari para subjek penelitian yang memberikan

keterangan bahwa Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri secara publik perbulan di website terkait laporan keuangan, kemudian ada laporan kegiatan per 24 (dua puluh empat) jam setelah kegiatan itu dilaksanakan.

Pengawasan terhadap Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri sesungguhnya terkait erat dengan program yang direncanakan lembaga amil zakat tersebut, karena itu inti dari tujuan pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan lembaga amil zakat dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang diprogramkan sehingga zakat benar- benar bisa diberdayakan untuk mengentaskan masalah perekonomian yang ada saat ini. Kepercayaan tersebut harus dibangun melalui akuntabilitas publik melalui pertanggungjawaban keuangan terutama operasional syariah lembaga amil zakat. Tujuan pengawasan haruslah positif, yaitu untuk memperbaiki, mengurangi pemborosan uang, waktu, material dan tenaga. Di samping itu, pengawasan juga bertujuan untuk membantu menegakkan agar peraturan ditaati, sehingga dapat mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya.

Kedua, lembaga mitra ataupun donatur perseorangan akan difasilitasi untuk bisa mengakses laporan dan laporan program. Dari hasil peneliti dapatkan dari para subjek penelitian yang memberikan keterangan bahwa Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri secara laporan fisik yang diterbitkan persemester yang menerima laporan ini hanya donator.

Ketiga, laporan akan dibuat secara transparan dengan melibatkan *auditor*, *update*, akses yang mudah dan *online*. Nurul fikri juga mempunyai laporan

melalui media bulletin diterbitkan pertahun diantara sesudah atau sebelum ramadhan.

Transparansi yang dimiliki Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul yang berupa akses mudah dengan prinsip *online* atau website yang di dalamnya memuat berbagai macam kategori atau menu pilihan diantaranya:

Home, yang memuat informasi aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan program kerja yang mana ini merupakan laporan kegiatan Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri.

Profil Kami, yang memuat hal-hal berupa keterangan Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul seperti latar belakang berdirinya Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul, Visi Misi, Tujuan, Konsep Operasional, Kategori Program, Struktur Organisasi, dan pengalaman Kerjasama.

Layanan, yang menyediakan sepertilayanan konsultasi zakat dan layanan jemput zakat dari seluruh kabupaten yang terdapat kantor cabang Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul.

Program, kegiatan yang menjadi dasar Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul untuk menyalurkan dana-dana yang diperoleh, dan penjelasan dari program yang di Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul seperti : *Disaster Risk Management* (bidang pencegahan bencana), Program Umat Mandiri Nurul Fikri (Pum-Nf), Program Nf Relationship atau program khusus kemitraan dalam hal pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Program Cahaya Generasi, Dan Program Charity & Empowering.

Partnership, yang isi dari menu ini berupa laporan kegiatan kerja sama dengan mitra, seperti laporan penyaluran dan laporan menerima bantuan dari mitra.

Komunitas, menerangkan kegiatan yang berupa perkumpulan dalam kegiatan seperti pengajian bulanan dan forum silaturahmi.

Laporan, di dalam laporan ini memuat laporan keuangan dari tahun 2013 sampai 2015 dan ditahun 2016 terakhir laporanya sampai di bulan September.

Donasi, memuat cara untuk mendonasikan harta para *Muzakki* baik itu berupa zakat penghasilan, infak dan shadaqah.

Konfirmasi, yang berupa biodata yang memberi donasi dan konfirmasi dana yang didonasikan digunakan untuk apa.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis, transparansi lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri sebagai lembaga amil zakat mengacu pada prinsip shidiq, yaitu terbuka dan tidak menyembunyikan anggaran sebaliknya adalah bentuk kebohongan yang paling jelas. Dalam kaidah ushul fiqh ditegaskan bahwa *ma la yatimmul wajib illa bih fahuwa wajib*, kalau kewajiban tidak bisa dijalankan kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib. Shidq adalah kewajiban. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran. Berdasarkan kaidah itu, maka menjalankan transparansi anggaran adalah wajib. Ini berarti, dalam pandangan Islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapuskan semua pahala ibadat kepada Allah SWT, sebab shidiq berkaitan dengan prinsip amanat sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas.

Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian penulis, berkaitan dengan proses informasi anggaran, amanat berkaitan dengan kesetiaan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran kepada yang berhak dalam istilah Islam, menyampaikan amanat kepada ahlinya sebagaimana pada lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri sebagai lembaga amil zakat. Untuk mengontrol shidq dan amanat, diperlukan sistem pengawasan. Dengan menggunakan istilah para ahli ushul fiqh, dapat disimpulkan bahwa pengawasan wajib karena shidq dan amanat tidak akan berjalan tanpanya. Pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa Transparansi anggaran. Amanah menegakkan transparansi anggaran adalah kewajiban agama yang mulia. Ia bukan saja mengantarkan manusia pada berbagai kebajikan, tetapi juga mengantarkan mereka kepada surga yang dijanjikan. Secara duniawi, transparansi anggaran, dalam kata-kata imam Ali adalah upaya memerangi musuh negara, menyejahterakan penduduk, dan memakmurkan negeri.¹⁰⁴

Jadi berdasarkan analisis penulis di atas, transparansi lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri sebagai lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakat yang akuntabel, terlihat dengan keterbukaannya dalam mengelola dana zakat melalui keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan kepada instansi berwenang yang ikut serta dalam integrasi pengelolaan zakat. Hal ini menjadi dasar bahwa transparansi pada lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri

¹⁰⁴ Transparansi dalam Perspektif Islam, <http://www.antikorupsi.org/id/content/transparansi-dalam-perspektif-islam>,

bersifat terbuka dalam pengelolaan zakat melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan dengan transparannya pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri dengan adanya kontrol dari pengurus internal dan pengawasan eksternal serta kontrol sosial dari masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya), maka peneliti dapat mengambil kesimpulan :

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya yang dilihat dari :

Pertama menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi, bahwa lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri sudah memenuhi syarat ini baik dengan pemerintah maupun kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dengan adanya laporan seluruh kegiatannya dari laporan langsung kepada lembaga pengawas yakni BAZNAS sedangkan kepada masyarakat berupa laporan yang diunggah di website dan buletin yang disebarakan.

Kedua Menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial, berdasarkan laporan yang peneliti dapat bahwa di dalam laporan selain menerangkan jumlah dana tapi segala bentuk kegiatan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri seperti hal seminar, bantuan kebakaran, bantuan banjir.

Ketiga menyediakan informasi mengenai manfaat sosial (*social benefit*) dan biaya sosial (*social cost*) yang terjadi akibat operasi perusahaan atau nilai tambah yang diberikan oleh perusahaan (*value add*) untuk jangka waktu atau priode

tertentu, dalam pelaksanaannya seluruh kegiatannya lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri. Dimana kegiatan lembaga dirancang terlebih dahulu dan berapa target dana serta untuk apa saja dana yang dibutuhkan.

Lembaga yang dikatakan akuntabel selain mencakup beberapa dasar diatas lembaga amil zakat harus memenuhi kepatuhan hukum yang berupa izin untuk mengumpulkan dana ummat serta adanya bentuk pengawasan. lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri dari hasil penelitian penulis dapatkan bahwa lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri dengan Rekomendasi BAZNAS Nomor : 093/SET.BAZNAS/01.02/X/2017 dan izin dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kota Palangka Raya No. 00-11-00/07/III/2016 serta dari Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan mengumpulkan uang dan barang. Selain itu dalam pengawasan ada 4 empat lembaga pengawas yaitu Baznaz, Kemenag, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial sebagai mana yang termaktub dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal (29) ayat 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rumah Peduli Nurul Fikri amanah atau akuntabel.

2. Transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat dalam konteks penyelenggaraannya berdasarkan terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Oleh karena itu berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan bahwa Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya dilihat dari pengelolaannya yang berupa penertbitan bulletin setelah ramadhan yang memuat segala bentuk kegiatan serta dilihat dari pelaporan yang bersifat publik yang ada di website yang memuat

dari hal laporan dan kegiatan, serta adanya keterbukaan dengan mitra dan *Muzakki* dalam kegiatan dana yang didapat yang di muat dalam grup media sosial seperti Whatsapp. Prinsip transparansi tersebut terlihat melalui keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan kepada instansi berwenang yang ikut serta dalam intergrasi pengelolaan zakat. Hal ini menjadi dasar bahwa lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri bersifat terbuka dalam pengelolaan zakat melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan dengan transparannya pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini, diharapkan Kepada Rumah Peduli Nurul Fikri yang mana lembaga ini berpotensi menjadi lembaga yang berbasis nasional maka dari itu agar lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri dapat menyelesaikan izin dari BAZNAS pusat serta dalam pengelolaannya dapat meningkat seperti pemodalan wirausaha, cangkupan lembaga dapat mencapai pelosok desa, dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan zakat.

Bagi masyarakat hendaknya melakukan pengawasan atau kontrol sosial terhadap lembaga amil zakat, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan pengelolaan zakat yang rawan sosial.

Bagi instansi atau lembaga terkait pengelolaan zakat hendaknya melakukan upaya kerjasama melalui terintegrasinya pengelolaan zakat, baik data, dana, dan manajemen zakat yang akuntabel dan transparan sebagai sumber ekonomi umat yang dapat memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abduh, Sjuhada, dkk, *Regulasi Zakat dan Kesejahteraan Sosial : Studi Legislasi dan Implementasi Perda Daerah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009.
- Al Albani, Muhammad Nashirudin, *Shahih Sunan Nasa'i Jilid 2*, (terjemah fathurahman dan Zuhdi), c. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih AlBukhari Buku 8*, (terjemah Amiruddin),c. II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perpektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqih islam wa Adillatuhu jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahannya*, Depok, Cahaya Qur'an, 2008.
- Departemen RI, *Manajemen Pengeloaan Zakat*, Jakarta: 2009.
- Ghoni, Djunaidi dan Fauzan Al-Mansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap: Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, Yogyakarta: DIVA Press, 2013.

Gie, The Liang, dkk, *Ensiklopedia Administrasi*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, c. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Kartoredjo, H.S, *Kamus Baru Kontemorer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani (kelompok penerbit Instrans), 2011.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Nurwairah, Nahed, *Peremberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf*, Sekolah Tinggi Agama Islam Palangka Raya: Jurnal Kajian Islam, volume 1 nomor 1: 2009.

Prastowo, Andi, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: DIVA Press, 2010.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2007.

Rahmaniar, *Menggali Potensi Umat Melalui Zakat (Studi Terhadap Pelaksanaan Zakat Di Kota Palangka Raya)* , Sekolah Tinggi Agama islam Palangka Raya, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 5 nomor 1, 2008.

Salman, Otje dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung : PT Refika Aditama, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Soemitro, Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, cet. II

Sukti, Surya, *Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

Sunggono, Bambang, *Metologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Tanzen, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras, 2011.

Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

B. INTERNET

Administrator, 2015, <http://www.rpnf.org/profil-rpnf/> Diakses pada tanggal 27 April 2015 Pukul 18.53 WIB.

Administrator, www.kemendagri.go.id, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada tanggal 11 April 2016.

Administrator, <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html>, diakses pada tanggal 1 november 2016.

Araujo, Lucio Borromeo de, *Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan prtisipasi masyarakat dalam local development program di timor-leste*, <http://luckyarezo.blogspot.co.id/2013/05/prinsip-transparansi-akuntabilitas-dan.html>, diakses pada tangal 9 april 2016.

Hidayat, Ahmad, *Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia*, <http://kebijakan-publik.blogspot.co.id/2011/03/transparansi-penyelenggaraan-pelayanan.html>, diakses pada tanggal 15 juni 2016.

Rizal, Muhammad, *Akuntabilitas: Dalam Presfektif Islam*, <http://www.larispa.or.id/berita/127-akuntabilitas-dalam-presfektif-islam-.html>, di akses pada tanggal 4 April 2016.

Saleh, amin Nur, <http://www.nuraminsaleh.com/2016/02/teori-kesadaran-hukum-dan-ketaatan-hukum.html>, diakses pada tanggal November 2016.

Sucipto, Agus, “*Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*”, <http://bazkabgarut.blogspot.co.id/2011/04/membangun-transparansi-dan.html>, diakses pada tanggal 1 April 2016 pukul 16:00 WIB.

C. SKRIPSI

Al-Amien, M. Faisal, “Pengumpulan Harta Zakat Di Kota Palangka Raya”,

Skripsi, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2013, t.d.

Hakim, Muhammad Munirul, “*Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas*

Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki di Rumah Zakat Cabang

Semarang”, *Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, diakses pada

tanggal 23 aaprel 2016.

Hamzah, Imron, “Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada

Badan Amil Zakat Kecamatan Jelai Kabupaten sukamara)”, *Skripsi*,

Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2006, t.d.

Khaerany, Rizky, “*Akuntabilitas Dan Transfaransi Lembaga Pengelola Zakat*

Tehadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki Dan Amil

Zakat Pada Dompot Dhuafa Sulsel)”, *Skripsi*, Makasar: Universitas

Hasanuddin Makasar, 2013, [http://repository.](http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4804?show=full)

[unhas.ac.id/handle/123456789/4804?show=full](http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4804?show=full), diakses pada tanggal 31

maret 2016 pukul 20.00 WIB.